

GRATIS

EDISI 14 SEPTEMBER - DESEMBER 2017

COKELAT

National Workshop

The advancement of communication

ancing Stakeholders Support
h into Sustainable Cocoa Produc

Penyusunan Kurikulum dan
Modul Pelatihan
Budi Daya Berkelanjutan dan
Pasca-Panen Kakao

KANTOR EKSEKUTIF

Belajar dari Kampung Kakao
di Tiga Wilayah Sentra
Produksi Kakao di Indonesia

LIPUTAN UTAMA

MELIBATKAN GENERASI MUDA DALAM
PRODUKSI KAKAO BERKELANJUTAN

LAPORAN UTAMA



9 772540 772136



CATATAN editor

HAMPIR di setiap negara yang masyarakatnya dominan bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, fenomena yang dihadapi adalah semakin berkurangnya jumlah tenaga kerja pertanian yang dikategorikan sebagai usia muda. Demikian pula halnya dengan Indonesia. Di kantong-kantong produksi pertanian, jumlah petani muda semakin menurun.

Bersama dengan para pihak, Cocoa Sustainability Partnership pun merespon hal tersebut. Para aktor yang bekerja di sektor perkebunan kakao mencoba menarik perhatian para generasi muda untuk terlibat langsung dalam sektor ini. Upaya yang dilakukan adalah mengumpulkan para petani muda di beberapa daerah di Indonesia dalam wujud lokakarya. Pihak pemerintah pun juga dihadirkan. Setidaknya untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana upaya pemerintah dalam menarik perhatian generasi muda ke sektor pertanian dan perkebunan.

Dalam edisi ini juga, COKELAT menghimpun beberapa praktik baik yang dijalankan oleh masyarakat untuk mengembalikan kejayaan kakao berkelanjutan Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah menciptakan ruang-ruang pembelajaran bersama dan berbagi pengalaman. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kampung kakao atau kampung cokelat.

Selamat membaca.

COKELAT

The advancement of communication

PENANGGUNG JAWAB
Cocoa Sustainability Partnership

PEMIMPIN REDAKSI
Armin Hari

EDITOR
Toha Arifin

ALIH BAHASA
Hamsani Hambali

TATA LETAK
di5ketch Studio

KANTOR EKSEKUTIF:
Cocoa Sustainability Partnership (CSP)
Graha Pena Lt.8 Suite 804-805
Jl. Urip Sumoharjo No. 20 Makassar
Tel: 0411 436 020
Fax: 0411 436 020
Email: communication@csp.or.id



Daftar Isi



10 Rekomendasi Seminar Nasional: Memperkuat Dukungan Para Pemangku Kepentingan untuk Melibatkan Para Generasi Muda dalam Produksi Kakao Berkelanjutan

LAPORAN UTAMA

- 07 Seminar Nasional: Melibatkan Para Generasi Muda dalam Produksi Kakao Berkelanjutan
- 12 Sosok Petani Muda Memimpin Masa Depan Kakao
- 29 Pelatihan Perancangan dan Penulisan Media Publikasi bagi Sekretariat Forum Kakao Daerah
- 30 Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan Dan Pasca Panen Kakao
- 31 Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNL) Bidang Kakao yang Berkelanjutan
- 32 Rekomendasi Audit Eksternal



ENGLISH SECTION

- 36 Introduction: Role of Youth and Community In Development of Sustainable Cocoa In Indonesia
- 37 Engaging Youths into Sustainable Cacao Production
- 40 Increasing Stakeholder Support to Engage Youth into Sustainable Cocoa Production
- 42 A Young Farmer Leading the Future of Cocoa
- 44 General Development on Strategy of Access Improvement to Planting Materials
- 48 Learnings from Cacao Village at Three Cacao Production Centers in Indonesia
- 59 Training in Designing and Writing the Publication Media
- 60 Drafting the Curriculum and Training Module for Sustainable Cocoa Cultivation and Post Harvest
- 61 Drafting the National Working Competency Standard (SKKNL) for Sustainable Cacao Cultivation
- 62 Recommendation of External Audit



18
Belajar dari
Kampung
Kakao di Tiga
Wilayah Sentra
Penghasil Kakao
di Indonesia



LAPORAN UTAMA

7

Melibatkan Para Generasi Muda dalam Produksi Kakao Berkelanjutan

10

Memperkuat Dukungan Para Pemangku Kepentingan untuk Melibatkan Para Generasi Muda dalam Produksi Kakao Berkelanjutan

12

Sosok Petani Muda Memimpin Masa Depan

14

Pengembangan Strategi Peningkatan Akses ke Bahan Tanam

18

Belajar dari Kampung Kakao di Tiga Wilayah Sentra Penghasil Kakao di Indonesia



29

Pelatihan
Perancangan dan
Penulisan Media
Publikasi bagi
Sekretariat Forum
Kakao Daerah

30

Penyusunan Kurikulum
dan Modul Pelatihan Budi
Daya Berkelanjutan Dan
Pasca Panen Kakao

31

Penyusunan Rancangan
Standar Kompetensi Kerja
Nasional (SKKNI) Bidang
Kakao yang Berkelanjutan

PERAN GENERASI MUDA DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAKAO BERKELANJUTAN DI INDONESIA

TIDAK bisa dipungkiri. Indonesia telah dianugerahkan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Ia kemudian dikenal sebagai negara agraris.

Pertanian, atau perkebunan, merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia yang menyumbang hampir dari setengah total pendapatan negara selama ini, dan sebagai penyokong utama kegiatan ekspor kita. Dan dari rentetan daftar komoditas ekspor tersebut, kakao menduduki di depan bagian atas.

Dengan segala potensi kekayaan yang ada, namun di lapangan kita lebih banyak menemukan kondisi tanaman yang sudah menua dan tidak diupayakan dengan maksimal. Belum lagi jika melihat porsi petani yang berusia di bawah 40 tahun yang sangat jarang ditemukan di wilayah perdesaan. Ke mana mereka semua? Meninggalkan desa untuk silau gemerlap kota yang selalu dijadikan tujuan yang lebih baik dan bermartabat. Begitu pemikiran sebagian besar generasi muda yang meninggalkan tanah kelahiran mereka di desa.

Melihat hal tersebut kemudian, Cocoa Sustainability Partnership, sebagai landasan nasional untuk kakao berkelanjutan di Indonesia, bersama mitra dan organisasi anggotanya terus mengupayakan untuk menciptakan kondisi yang bisa menarik perhatian para generasi muda untuk berkontribusi nyata ke sektor perkebunan. Salah satu kegiatan dilaksanakan adalah dengan mengadakan seminar nasional tentang upaya dukungan para pemangku kepentingan di sektor kakao agar bisa menarik perhatian generasi muda ke produksi kakao yang berkelanjutan. Beberapa orang petani muda dan sukses pun turut dihadirkan.

Beberapa rekomendasi dari kegiatan tersebut dipaparkan secara rinci dalam terbitan kali ini. Proses diskusi yang diikuti oleh peserta sangatlah cair sehingga bisa memberikan saran terhadap persoalan yang dihadapi. Pihak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, pun turut dihadirkan. Titik temu pengalaman di lapangan dengan dukungan kebijakan dari pemerintah diramu menjadi beberapa catatan penting dari pelaksanaan seminar ini.

Selain itu, untuk melihat bagaimana upaya Forum Kakao Daerah beserta pemerintah setempat dalam membangkitkan pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia. Wujudnya yang dijadikan oleh Tim Redaksi COKELAT dalam melihat hal tersebut adalah dengan mengkaji tiga kampung kakao, atau biasa juga disebut sebagai kampung cokelat, di tiga wilayah sentra penghasil kakao terbesar di Indonesia.

Cerita tentang pengembangan dan interaksi dengan pihak berkepentingan lainnya, khususnya petani kakao, menjadi catatan menarik selama kunjungan tersebut. Harapan-harapan akan kebangkitan kakao di daerah tersebut menjadi sangat kuat. Kampung kakao inilah yang diyakini bisa dijadikan sebagai laboratorium lapangan yang mempertemukan para petani kakao dengan penikmat produk cokelat untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman selama ini. Dukungan teknis kepada petani juga diharapkan bisa terjadi di kampung kakao ini. Alur transfer pengetahuan ke petani akan semakin memampukan mereka dalam mengelola lahan perkebunan mereka di kemudian hari.

Dan sebagai penutup, Tim Redaksi COKELAT juga menyajikan ringkasan kegiatan penyusunan materi Kurikulum dan Modul Pelatihan Budi Daya Kakao Berkelanjutan dan Pasca Panen, dan Standar Kompetensi Kerja Nasional untuk Budi Daya Kakao Berkelanjutan, yang nantinya akan dijadikan sebagai referensi resmi dalam melakukan pelatihan kepada para pelatih dan tenaga penyuluhan di seluruh Indonesia. (CSP/AH)



Foto: Armin Hari

Seminar Nasional LIBATKAN PARA GENERASI MUDA DALAM PRODUKSI KAKAO BERKELANJUTAN

COCOA Sustainability Partnership menghimpun pemangku kepentingan di sektor kakao khususnya agripreneur muda, pemerintah, perusahaan industri pengolahan kakao dan cokelat, akademisi, pelaksana program pengembangan kakao dan pembinaan generasi muda dalam sebuah lokakarya nasional dengan tema *"Memperkuat Dukungan Para Pemangku Kepentingan untuk Melibatkan Generasi Muda Dalam Produksi Kakao Berkelanjutan."* Lokakarya ini nantinya akan merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang menegaskan langkah-langkah dan peran dari masing-masing pihak.

Dengan menghadirkan para pembicara-pembicara yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang kajian generasi muda dan hubungannya dengan sektor pertanian dan perkebunan, seminar nasional ini diupayakan bisa mengidentifikasi kondisi teranyar, termasuk kebijakan dan program pemerintah untuk menarik generasi muda ke sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu,

seminar nasional ini juga bertujuan sebagai wadah untuk saling berbagi praktik-praktik terbaik dan pembelajaran tentang partisipasi generasi muda di sektor pertanian dan perkebunan, meningkatkan pemahaman rantai nilai kakao yang potensial di kalangan generasi muda, dan mengembangkan rekomendasi-rekomendasi bagi semua pihak untuk menarik minat perhatian para generasi muda untuk terjun langsung dalam sektor pertanian dan perkebunan, dan tentu saja di sektor kakao yang berkelanjutan di Indonesia.

Indonesia sebagai negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia, setelah Pantai Gading dan Ghana, semenjak tahun 2000 telah mengalami penurunan nilai produksi dan produktivitas kakao dalam negeri. Bisa dikatakan bahwa akibat dari penurunan yang drastis tersebut, kita telah kehilangan lebih dari 30% total produksi kakao dalam negeri. Sedangkan kakao di negara ini merupakan sebuah komoditas yang strategis di mana sekitar 1.7 juta petani kakao berskala kecil menggantungkan kehidupan mereka



Foto: Armin Hari

Penurunan produksi dan produktivitas kakao tersebut tentu saja disebabkan oleh beberapa hal utama, antara lain kondisi tanaman yang sudah menua dan serangan hama penyakit.

Selain itu, umur petani kakao kita adalah rata-rata di atas 45 tahun, hal ini perlu diantisipasi dengan mendorong generasi muda untuk berkerja di sektor kakao. Urbanisasi dan daya tarik berkerja di kebun merupakan kendala utama dalam estafet kerja di sektor kakao. Selain itu, minat generasi muda untuk bekerja di pedesaan juga menurun sehingga lebih banyak ditemukan di kota-kota besar dengan alasan untuk mencari sumber penghidupan yang menurut mereka lebih layak. Lahan-lahan produktif di desa dibiarkan tidak terkelola secara optimal. Tanaman tidak dikelola dengan baik oleh pekebun, yang usianya sudah tidak

muda lagi. Pilihan pekerjaan sebagai petani atau pekebun dipandang tidak menarik lagi bagi generasi muda.

“Sektor kakao merupakan sektor yang penting bagi pemerintah olehnya perhatian terhadap sektor ini selalu kami tingkatkan termasuk dukungan-dukungan yang dapat mendorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor kakao. Berbagai program pemerintah telah dirancang untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda di sektor ini,” kata Ir. Bambang MM., Direktur Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian. Bambang menekankan bahwa untuk mendorong pemuda di sektor kakao, diperlukan terobasan yang sesuai dengan aspirasi petani. Ia mencontohkan model bisnisnya diubah dari model konvensional saat menjadi gerakan pengembangan ekonomi masyarakat dan terlembagakan sebut

LEM-Lembaga Ekonomi Masyarakat dan lembaga ini perlu didukung dengan paket teknologi (*technology packet*) yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan binis mereka.

“Meningkatkan minat generasi muda terhadap sektor kakao merupakan salah satu target Roadmap Kakao Berkelanjutan Indonesia (2020 Roadmap for Sustainable Indonesian Cocoa) CSP selain target meningkatkan produksi dan produktivitas kakao Indonesia menjadi dua kali lipat,” kata Rini Indrayanti, yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Eksekutif CSP. *“Generasi muda merupakan pemangku kepentingan kunci guna memastikan keberlanjutan sektor kakao Indonesia di masa depan. CSP sebagai platform Nasional kemitraan publik-swasta untuk pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia melihat bahwa semua pihak*



perlu kepedulian para pemangku kepentingan yang sudah terjalin saat ini, perlu meningkatkan peranannya untuk turut mendorong pada upaya untuk menggerakkan generasi muda dalam membuat kakao menjadi sektor yang kompetitif dan menguntungkan secara ekonomis bagi generasi muda dapat tertarik untuk berusaha berbisnis dalam sektor kakao.”

Dari pemaparan para pembicara terlihat bahwa masalah yang dihadapi oleh generasi muda adalah terbatasnya akses terhadap lahan, informasi, pengetahuan, permodalan dan kurangnya dukungan berbagai pihak. Selain itu terlihat bahwa minat dan keinginan kaum muda terhadap sektor pertanian, khususnya kakao, masih tinggi.

Samsul Haris, 21 tahun, salah seorang petani muda kunci yang akan membagi pengalamannya dalam seminar ini, yakin bahwa kakao dapat memberikan penghidupan yang sejahtera. Namun, dia tahu bahwa untuk mencapai itu dibutuhkan kerja keras seperti yang telah dilakukan oleh orang tuanya selama ini. Kesuksesan kedua orang tuanya itulah yang mendorong Syamsu untuk ikut membudidayakan kakao di desanya. Samsul sudah menanam sendiri kakaonya di lahan seluar 1 hektar

pemberian orang tuanya di desa Limboro Rambu-Rambu, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. “Saya beruntung diberi tanah oleh orang tua saya, tetapi saya tidak mempunyai modal kerja. Untuk mendapat modal, saya bekerja membantu orang tua di kebun mereka dan dari pendapatan itulah yang saya investasikan ke kebun saya,” kata Samsul yang saat ini tengah kuliah di Universitas Sulawesi Barat. Mimpiya adalah menjadi petani yang sukses dan bisa berperan membangun desanya.

Masnawati, 22 tahun, membuka usaha pembibitannya sejak lulus dari SMK 1 Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2012 silam. Hasil dari pembibitan tersebut mampu memberinya gelar sarjana dari Politani Pangkep. Cita-citanya adalah mengembangkan usaha pembibitannya dan mencoba bisnis penjualan saprodi selain tetap mempertahankan produktivitas kebun kakaonya di atas 1 ton per hektar. (CSP-AH)



Rekomendasi Seminar Nasional **MEMPERKUAT DUKUNGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MELIBATKAN PARA GENERASI MUDA DALAM PRODUKSI KAKAO BERKELANJUTAN**

DALAM pelaksanaan seminar nasional yang diberi tema Memperkuat Dukungan Para Pemangku Kepentingan untuk Melibatkan Para Generasi Muda dalam Produksi Kakao Berkelanjutan, para peserta sesi diskusi diminta untuk menyumbangkan ide dan sarannya dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi. Para peserta yang terdiri dari perwakilan institusi kepemerintahan di tingkat pusat dan daerah, industri, para ahli, pelajar dan mahasiswa, dan petani muda.

Dengan melakukan diskusi dalam kelompok kecil, kesimpulan dan rekomendasi yang dicapai adalah sebagai berikut:

- Memicu dan menyediakan dukungan melalui program-program pendidikan formal dan non-formal.
- Meningkatkan motivasi para generasi muda untuk terlibat dalam sektor kakao dengan memberikan insentif, tidak hanya dalam bentuk dukungan pendanaan, tetapi bisa juga berwujud program magang, pelatihan, sertifikasi, dan lain sebagainya.
- Memicu dan membangun portal komunikasi melalui

sosial media sebagai media berbagi informasi dan hasil pembelajaran.

- Perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan akses terhadap lahan bagi generasi muda. Salah satu idenya adalah dengan memanfaatkan institusi pemerintah berupa lahan yang dimiliki oleh BUMN dan BUMD untuk dijadikan sebagai kebun kakao.
- Mengemas ulang sektor pertanian sebagai sebuah profesi profesional haruslah menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan di sektor kakao untuk menarik minat para generasi muda.
- Memacu terciptanya institusi petani yang kuat dan mandiri sehingga para petani muda bisa memiliki kemampuan untuk bisa terpercaya di institusi perbankan dan pembiayaan.
- Para pemangku kepentingan, baik pemerintah dan sektor swasta, khususnya institusi penelitian, memberikan



Foto: Armin Hari

dukungan dan informasi bagi para petani muda yang akan bekerja di sektor kakao.

- Mengembangkan institusi keuangan di tingkat perdesaan.
- Seminar ini adalah sebuah momentum untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada petani dan pemangku kepentingan lainnya untuk kembali sadar dan bekerja keras dalam rangka mengembalikan kejayaan kakao untuk kesejahteraan para petani kakao di Indonesia.
- Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah di setiap desa, para generasi muda berperan untuk berpartisipasi dan memacu petani lainnya untuk mengembangkan potensi tersebut dengan maksimal. Oleh karenanya, sinergi antara petani, pelaku bisnis, dan sektor perbangunan sangatlah dibutuhkan dalam menumbuhkan dan mengembangkan sektor pertanian di wilayah perdesaan.
- Memperkuat institusi petani untuk mengelola kegiatan bisnis di wilayah perdesaan adalah satu upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan petani yang memiliki kemampuan untuk mengakses sumber pembiayaan di bank. Jika mereka memiliki akses tersebut, maka akan ada beragam kegiatan bisnis di perdesaan yang bisa dikembangkan.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan memberikan perhatian yang lebih dan mendukung para petani untuk mengimplementasikan sistem tata kelola perkebunan yang bersahabat dengan lingkungan dan mampu memberikan kesejahteraan bagi mereka.
- Hal utama dalam mengembangkan perkebunan rakyat adalah kele-

bagaan petani, dan sumber daya manusia yang kuat dan profesional.

- Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera melaksanakan pengembangan pertanian dengan konsep kolektivitas dan keterhubungan antar produk pertanian yang tersebar di sebagian besar desa. Membangun kelembagaan petani di desa yang dihubungkan dengan desa lainnya antar kecamatan, hingga tingkatan kabupaten dan provinsi.
- Organisasi LEM Sejahtera harus diisi dengan generasi muda terbaik yang telah diseleksi kompetensi kepemimpinannya dan kemampuannya dalam menjalankan bisnis.
- Generasi muda harus menjadi pemimpin di desanya sendiri sehingga bisa memotivasi petani muda lainnya untuk bisa terlembagakan dan mempersiapkannya agar bisa layak di institusi perbankan.
- Dengan LEM Sejahtera, sektor pertanian yang ada di wilayah perdesaan bisa tumbuh sejalan dengan penguatan kelembagaan petani di desa.
- Anggapan yang melekat kepada para aktor di sektor pertanian dipandang sebagai hal yang kurang menarik, namun hal tersebut akan hilang secara perlahan jika pendapat yang diperoleh dari sektor pertanian juga ditingkatkan.
- Beberapa program dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian adalah dengan menyediakan akses permodalan untuk wirausaha dan memberikan pedoman dalam memperkuat kelembagaan petani.

Sebagai tambahan, saat ini juga ada program magang dan pelatihan gratis di pusat-pusat pelatihan pertanian.

- Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian saat ini menjalin kerja sama dengan Cocoa Sustainability Partnership dalam mengembangkan Kurikulum dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao.
- Kurikulum dan modul pelatihan tersebut akan menjadi sumber referensi pelatihan para penyuluh pertanian lapangan.
- Pusat Pelatihan Pertanian sendiri akan melaksanakan pengembangan program Rural Empowerment Agriculture Development (READ) yang nantinya akan digandengkan dengan pemerintah daerah, seperti Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sebagai tambahan, Puslatan juga akan bekerja sama dengan anggota-anggota CSP lainnya untuk pengembangan sektor kakao. (CSP/AH)



Muhammad Iqbal SOSOK PETANI MUDA MEMIMPIN MASA DEPAN

MUHAMMAD Iqbal (26) melalui hari-harinya di District Cocoa Clinic (DCC) Bireuen, lokasi Koperasi Perkebunan Kakao Bireuen (KPKB) berada. Dia menyelesaikan pelatihan Praktik Budidaya Kakao (Good Agricultural Practices/GAP) pertamanya di tahun 2010 dan seyogyanya menyelesaikan kuliahnya di tahun 2015. Setelah menunda kuliahnya untuk mendukung keluarganya melalui kebun kakao, dia baru-baru ini melanjutkan kuliah di bidang agri-bisnis dan perkebunan yang berkelanjutan.

Dia memulai dari hanya 400 pohon kakao dan 56 pohon kelapa yang berfungsi sebagai pohon pelindung. Meskipun tidak memiliki lahan yang luas, namun menurutnya, ukuran lahan tidak menentukan tingginya hasil dan kualitas, tetapi yang penting adalah bagaimana pohon-pohon tersebut dipelihara. Dia membuktikan bahwa budidaya kakao tidak hanya untuk generasi tua dan mencontohkan apa yang dapat dicapai melalui cara budidaya kakao yang professional.

Melangkah pada ketidak pastian, pada tahun 2010, Iqbal bergabung dengan Swisscontact melalui Program Peningkatan Ekonomi Kakao Aceh (PEKA) dan berpartisipasi dalam kelompok pertama Pelatihan untuk Pelatih (ToT) yang dilaksanakan di desanya Juli Mee Teungoh, Bireuen. Setelah pelatihan, dia bertekad untuk merehabilitasi pohon kakao nya yang sudah tua yang ditanam di tahun 1992 oleh orang tuanya. "Pada saat itu, rekan-rekan petani merespon negatif atas apa yang saya lakukan karena tidak mengerti mengenai praktik pertanian ini. Saya yakini bahwa usaha saya akan berhasil dan kebun saya akan menghasilkan," papar Iqbal.

Produksi tahunannya sebelum intervensi PEKA hanya 350 kg/ tahun. Sejak saat itu, berdasarkan catatan di bulan Desember 2016, kebunnya mengasilkan 910 kg/ tahun. Sekarang banyak rekan petani yang datang dan meminta entris untuk disambung samping ke pohon kaka mereka untuk peningkatan produksi.



Lebih lanjut lagi, dia juga memproduksi bibit kakao berdasarkan permintaan dan menjualnya dengan harga bervariasi, mulai dari Rp. 3.000,- sampai Rp. 7.000,- per bibit.

Kepemimpinan dan Kerja Sama

Keterlibatan Iqbal dengan Swisscontact diteruskan melalui SCPP, setelah PEKA selesai di tahun 2012. Dia kemudian menjadi fasilitator di proyek penjangkauan SCPP di Bireuen. Pada tahun 2013, Iqbal terpilih untuk menjadi anggota Sistem Manajemen Internal (Internal Management System -IMS) di program sertifikasi UTZ. Dua tahun kemudian, Iqbal menjadi manajer Koperasi Perkebunan Kakao Bireuen (KPKB), yang didirikan pada bulan Mei 2015.

Saat ini, Iqbal mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk aktivitas IMS dan membina unit bisnis koperasinya. Dia juga berperan sebagai pengendali kualitas, di mana menambahkan pendapatannya sebesar Rp. 75,- per kg. Di tahun 2016, dengan dukungan dari JeBe Koko, Iqbal mendapatkan pelatihan *Good Business Practices* (GBP) untuk IMS, kemampuan

penelusuran, dan sertifikasi perdagangan biji kakao telah menjadi sumber pendapatan utama baik untuk KPKB maupun Iqbal sendiri. Sebagai manager, dia juga layak menerima 13% dari keuntungan tahunan yang dihasilkan oleh koperasi. Dia memperkirakan menerima penghasilan sekitar Rp. 15 - 20 juta (USD 1,126 - 1,500) dari total penjualan di tahun 2016.

Kualitas kakao KPKB yang tinggi menarik perhatian PT. Pipiltin di Jakarta, yang akhirnya Pipiltin menyetujui kontrak khusus pembelian biji kakao. Pipiltin membayar harga premium sekitar 60% per kg dari biji kakao yang dihasilkan di area yang sama. Pada tahun ini, Iqbal berhasil mendapatkan Rp. 14,8 juta dari hasil penjualan 315,5 kg biji kualitas tinggi miliknya, di mana ini belum termasuk penjualan biji yang biasa, berikut tambahan pendapatan dari penjualan bibit, pengendalian kualitas, dan perannya sebagai manajer. Berkat pemahamannya tentang kompleksitas penanaman kakao, Iqbal menerima undangan ke Jakarta pada tanggal 22 November 2016, Iqbal dianugerahi



penghargaan peringkat tiga terbaik dalam kompetisi nasional memperingati Hari Kakao Indonesia ke-4 dalam kategori kualitas biji kakao terbaik.

“Sekarang, saya mampu untuk membayai kuliah adik, saya sendiri, dan menyokong seluruh keluarga.”
Demikian ujarnya. (Swisscontact)



Lokakarya Nasional

PENGEMBANGAN STRATEGI PENINGKATAN AKSES KE BAHAN TANAM

SEBAGAIMANA mandat tahun ini, Cocoa Sustainability Partnership melaksanakan lokakarya tentang bahan tanam kakao. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan menghadirkan para pemangku kepentingan di sektor ini. Lokakarya bahan tanam kakao ini diselenggarakan guna mencapai tujuan bahwa (1) memastikan para petani kakao memperoleh akses ke sumber bahan tanam yang bersertifikat; (2) mendukung pengembangan kebun benih, kebun batang bawah, dan pemberian yang telah memenuhi persyaratan bahan tanam sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 314/Kpts/KB.020/10/2015 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao; dan (3) menyelaraskan strategi antar pemangku kepentingan di sektor kakao,

khususnya pemerintah, sektor industri, dan petani kakao.

Sesi pertama lokakarya yang dilaksanakan ini ditujukan sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah tentang program penyediaan bahan tanam, penerapan kebijakan, metode distribusi bahan tanam, kondisi dan keadaan terbarukan dari sektor usaha perbenihan dan dampak penerapan kebijakan tersebut. Untuk menjelaskan hal tersebut, maka beberapa pakar pun dihadirkan untuk menyampaikan presentasi mereka. Ir. Hj. Rosmi Kantao, MM., Kepala UPT Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perkebunan/BSPMBP Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan menyampaikan sosialisasi menyangkut Kepmenan No. 314/Kpts/KB.020/10/2015 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao, Dr. Agung Wahyu Susilo, SP, MP., sebagai perwakilan Kelembagaan Balai Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, membicarakan



tentang bahan tanam kakao dan cara pemberihannya.

Dan untuk memberikan gambaran tentang penerapan kebijakan tersebut, dua orang petani kakao yang selama ini mengerjakan usaha pemberian di lokasi mereka dihadirkan juga. Endrianto dari Koperasi Kakao Sinar Jaya, Lampung, menyampaikan pengalamannya menyangkut pengembangan benih kakao berkualitas di Lampung. Selain itu, Jono dari Kelompok Tani Sukses, Kolaka Timur, memaparkan pengembangan benih kakao skala kecil.

Pada sesi kedua, para peserta dibagi menjadi tiga kelompok kecil dengan tema yang berbeda guna mendiskusikan isu-isu menyangkut pengembangan bahan tanam kakao. Dari hasil diskusi tersebut, hal-hal utama yang dilahirkan adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 314/Kpts/KB.020/10/2015 kepada petani dan pemangku kepentingan lainnya masih dirasa sangat dibutuhkan.
- Kebijakan tersebut tentu saja bisa direvisi. Namun hal yang dibutuhkan adalah bagaimana

mengidentifikasi komponen mana yang menjadi beban dari kebijakan sertifikasi tersebut. Jika telah dikenali persoalannya, maka solusi saran bisa diajukan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

- Di tingkat daerah, UPTD dan dinas kabupaten dan provinsi bisa mengusulkan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk membangun kebun pemberian di daerah masing-masing. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Misalnya saja inventarisasi sumber bahan tanam yang potensial, atau luasan lahan yang akan diajukan. Data tersebut haruslah jelas mencantumkan tentang lokasi, kapasitas, dan jenis klon yang tersedia. Selain itu, pihak pemerintah daerah juga harus menumbuhkan organisasi regional, atau institusi perbenihan yang kuat (UPTD Distribusi Benih)

Sedangkan rekomendasi untuk mendukung petani agar mampu memenuhi standar bahan tanam yang sesuai dengan peraturan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

- **Jangka Pendek:**
 - Mengoptimalkan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 314/Kpts/KB.020/10/2015 secara menyeluruh kepada kelompok penyuluh, petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani.
 - Standar penerapan tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Permentan No. 50/2015 and Kepmentan No. 314/2015) menjadi salah satu tema diskusi tematik bagi kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
 - Mengumpulkan data kebun pemberian yang sudah ada di tingkat lokal dan di daerah anggota CSP. Dengan data tersebut, CSP bisa mengusulkan, atau menegosiasikan dengan Dirjenbun untuk memberikan kebijakan khusus menyangkut kebun benih dalam memperoleh sertifikasi.
 - Memicu dan mengembangkan minat untuk mengupayakan produsen benih yang potensial dengan cara melakukan analisis usaha perbenihan yang jelas, informasi pasar, dan mengetahui proses pemerolehan sertifikasi.
 - Memperkuat kelembagaan petani guna memfasilitasi tata kelola kolektif sertifikasi
- **Jangka Panjang:**
 - Menciptakan periode transitional perbenihan untuk memenuhi syarat yang diatur dalam Kepmentan No. 314/Kpts/KB.020/10/2015.
 - Asistensi yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, Puslitkoka, sektor swasta, dan LSM) kepada petani dalam mengimplementasikan prosedur



Foto: Armin Hari

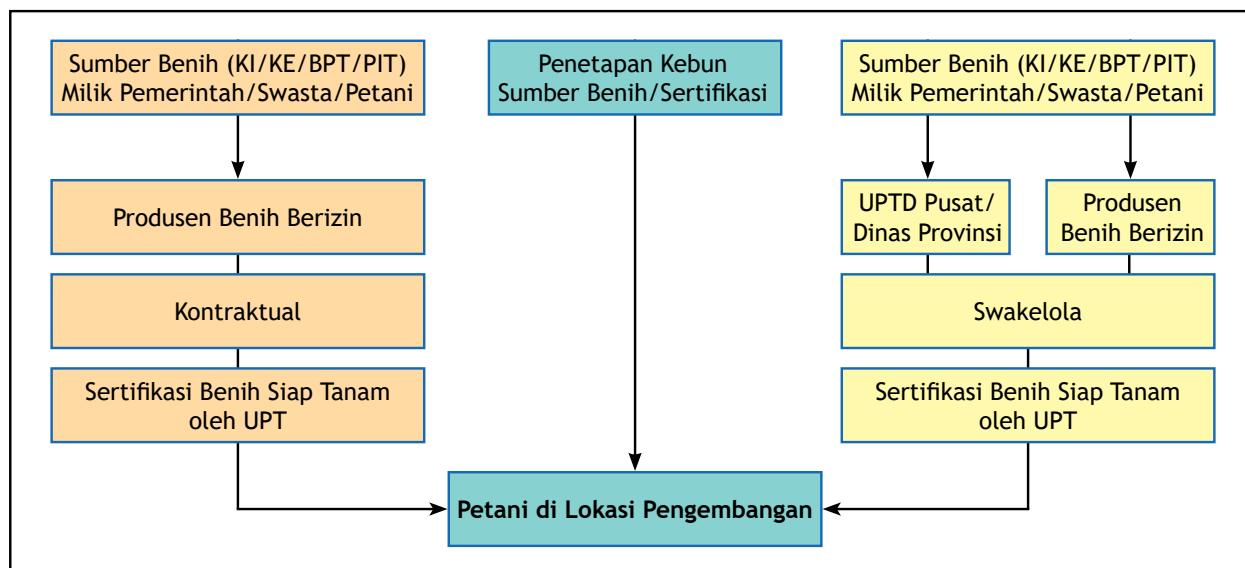
sertifikasi.

Rekomendasi tentang bagaimana petani bisa memperoleh akses yang mudah terhadap bahan tanam kakao bersertifikasi untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah sebagai berikut:

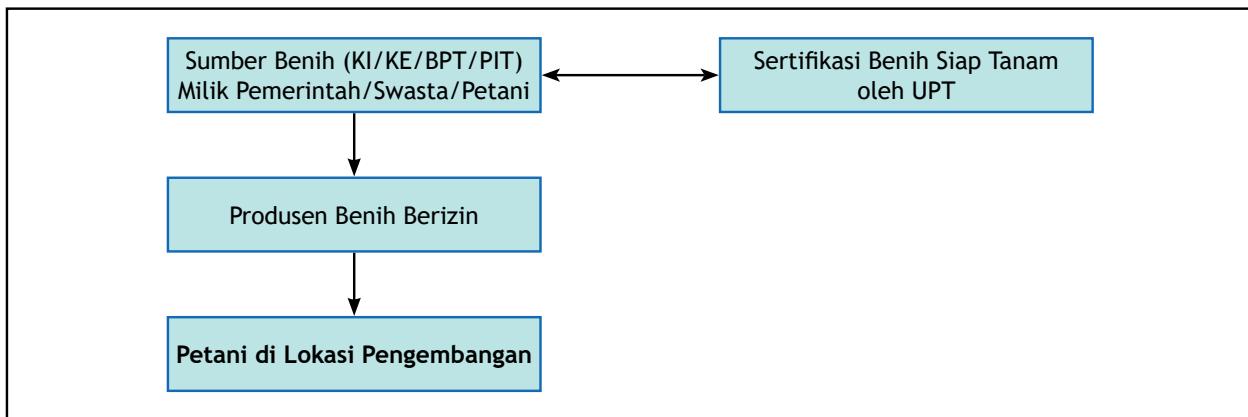
- Jangka Pendek:
 - Menyediakan akses informasi persyaratan biaya sertifikasi kepada petani.
 - Membangun koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan pemerintah daerah bagi perbenihan yang sudah ada agar bisa dimasukkan dalam program pemerintah untuk penyediaan bahan tanam di tahun 2017 dan 2018.
 - Memperkuat jaringan produksi dan jalur pemasaran.
 - Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan petani.
- Jangka Panjang:
 - Pemerintah provinsi, daerah, dan UPTD mengajukan ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk membangun kebun bahan tanam yang bersumber di lokasi sendiri.
 - Pemerintah berfungsi sebagai stimulator dan regulator dalam mengembangkan sistem perbenihan yang berpihak ke petani (Program Desa Mandiri Benih)

Rekomendasi Model Bisnis Perbenihan

Pada dasarnya, pemerintah telah mengeluarkan model dan alur bisnis perbenihan yang telah diatur dalam beberapa kebijakan. Alur tersebut adalah sebagai berikut:



Jika melihat alur yang telah ditetapkan tersebut, tentu saja akan memberikan beban yang berlebihan kepada pengusaha perbenihan dalam skala kecil. Dan alur yang direkomendasikan dan lebih sederhana adalah sebagai berikut:



Model Ideal Bisnis Perbenihan

Ada dua model bisnis yang dapat dikembangkan yaitu sistem Waralaba dan Kontrak. CV, PT atau koperasi dapat bekerja sama dengan sumber benih dalam bentuk kontrak atau MoU. Dalam hal ini, belum memungkinkan bagi kelompok tani karena tidak berbadan hukum. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara kedua model bisnis tersebut.

Model Bisnis	Kelebihan	Kekurangan
Waralaba	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan berkelanjutan. Update info dan produk. Pembayaran bisa lebih fleksibel. Kepastian suplai. Kerja sama pemasaran. Cek kelayakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Ada biaya waralaba. Perlu membangun reputasi (kelompok tani) dan akan menyulitkan bagi pemain baru. Ada syarat-syarat yang diperlukan dan memerlukan proses yang lama.
Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada biaya. Proses lebih cepat. Syarat-syarat lebih mudah. Pembinaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu uang muka (50%). Sulit mendapat kepastian suplai. Pembayaran lebih ketat.

Menyelaraskan Konsep Model Bisnis Perbenihan dengan Kebijakan Pemerintah

Untuk tujuan jangka pendek, maka rekomendasi yang ditawarkan adalah model bisnis yang menggunakan sistem kontrak. Hal tersebut juga akan sangat mendukung dalam upaya memastikan jumlah pasokan yang ada. Kontrak, atau Nota Kesepahaman, haruslah dibangun antara PT, CV, dan koperasi. Dengan catatan bahwa cakupan muatan kontrak tersebut haruslah jelas dan saling menguntungkan.

Sedangkan untuk jangka menengah, dirasa sangat penting untuk mulai mengembangkan model bisnis perbenihan yang menerapkan sistem waralaba dan kontrak. Dan untuk jangka panjang, maka hal yang harus dilakukan adalah bahwa setidaknya dalam setiap provinsi dikembangkan kebun induk dan kebun entres di wilayah sentra penghasil kakao. (CSP-AH)



BELAJAR DARI KAMPUNG KAKAO DI TIGA WILAYAH SENTRA PENGHASIL KAKAO INDONESIA

LAIN ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Peribahasa tersebut mungkin bisa mewakili beberapa inisiatif kelompok tani dan pemerintah daerah sebagai bentuk upaya peningkatan produktivitas kakao di daerah masing-masing. Sebagai wujud nyata dari program inovasi untuk pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia, beberapa pemerintah daerah di sentrasentra produksi kakao mencoba menerapkan inisiatif untuk mengembangkan kakao itu sendiri dalam bentuk kampung kakao, atau kampung cokelat. Dalam penerapan model tersebut, para petani yang tergabung dalam kelompok tani di tingkat desa, mencoba menghidupkan kembali semangat bertani dan menata ulang harapan mereka pada tanaman kakao.

Berikut ini adalah ulasan mendalam tentang tiga model kampung kakao yang dikembangkan di tiga kabupaten berbeda di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Tim Redaksi COKELAT berkesempatan mengunjungi tiga pola pengembangan kampung kakao di tiga tempat berbeda. Nagari Model

Kakao di Nagari Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat; Kampung Kakao di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan; dan Kampung Cokelat di Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.



Foto: Armin Hari

KAMPUNG KAKAO: KEBANGKITAN KAKAO LUWU UTARA

SEMENTJAK dahulu, jika kita berbicara tentang kakao di Sulawesi, pasti nama Masamba dan Luwu Utara akan muncul sebagai daerah penghasil kakao terbesar. Itu sebelum beberapa persoalan tentang kakao yang tidak bisa diselesaikan oleh petani muncul seperti: kondisi tanaman tua, serangan hama dan penyakit, dan kemampuan petani untuk akses agroinput. Beberapa upaya pernah dilakukan oleh pihak terkait, misalnya saja dengan pengenalan dan penerapan good agricultural practice (GAP) dan identifikasi pelepasan klon kakao unggul nasional dengan nama Masamba Cocoa Clone (MCC) 01 dan

MCC 02 melalui kerja sama lintas lembaga dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao pada akhir tahun 2014. Namun upaya-upaya tersebut belum mampu memberikan hasil yang maksimal, khususnya dalam upaya peningkatan produksi yang ditargetkan 3-4 ton/ha/tahun.

Beranjak dari persoalan tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, melalui DIPA ABPD II Tahun Ajaran 2015, memperkenalkan dan menerapkan sebuah model pembinaan untuk target peningkatan produksi minimal 2 ton/ha/tahun yang dinamakan Kampung Kakao. Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah untuk menguji dan menerapkan model pendampingan yang diyakini mampu mendorong peningkatan produksi dari rata-

-rata 0,9 ton/ha/tahun menjadi 2 ton/ha/tahun. Dan ini adalah langkah awal dalam mewujudkan suatu kawasan Desa Wisata Kakao. Desa wisata kakao diawali dari Desa Batu Alang, dengan lokasi 50 ha dan 2 kelompok tani, Desa Kalotok dan Desa Bone Baru masing-masing dengan luas lokasi 25 ha dan 1 kelompok tani yang ketiganya terletak di Kecamatan Sabbang. Program ini dimulai pada bulan Maret 2015 dan akan berakhir pada Desember 2015.

Dalam penerapan Program Kampung Kakao ini, ada tiga hal pokok kegiatan yang dilaksanakan, yaitu Pendampingan Peningkatan Produksi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kakao, dan Sistem Dukungan.

Pendampingan Peningkatan Produksi

Fokus pendekatan model pendampingan ini adalah dengan melakukan pendampingan perorangan terhadap petani atau kebun yang tergabung dan terdaftar dalam satu kelompok tani sehamparan dengan perbandingan 1 orang pendamping bertanggung jawab untuk 12 hingga 13 petani/kebun dengan frekuensi kunjungan minimal satu kali ke setiap kebun bersama pemilik. Peran pendamping ini adalah memberikan rekomendasi teknis kepada petani menyangkut hal-hal yang perlu segera dilaksanakan berdasar analisa kondisi kebun. Rekomendasi tersebut tercatat dalam buku kontrol kebun yang dipegang oleh petani atau pemilik kebun sebagai alat monitoring selanjutnya.

Ir. Imran, Kabid Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, mengatakan bahwa pendamping tersebut haruslah dua orang untuk satu kelompok tani yang beranggotakan 25 orang dengan lahan hamparan seluas 25 hektar. Dalam pelaksanaan tugasnya, pendamping tersebut juga akan didukung oleh TNI melalui seorang petugas Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk setiap luas hamparan 50 hektar. Keterlibatan Babinsa dalam program ini adalah untuk menguatkan instruksi dan rekomendasi teknis yang diberikan oleh pendamping.

Untuk menjaga keberlangsungan proses pendampingan, dibangun kesepakatan untuk memberikan biaya operasional bagi pendamping sebesar 1,5% dari tambahan kenaikan hasil produksi yang diperoleh petani setelah mencapai target minimal 2 ton/ha/tahun.

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kakao

Sebagai kelanjutan dari pengembangan Kampung Kakao ini pada tahap selanjutnya akan dikembangkan menjadi kawasan kakao terpadu. Melalui program pendampingan bagi masyarakat, termasuk kaum perempuan tani, selain diarahkan untuk memperkuat industri perkebunan, juga sebagai lokasi kawasan wisata terpadu. Untuk mencapai hal itu semua, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengelola



Foto: Armin Hari

semua sektor menjadi penting termasuk juga mempersiapkan rumah-rumah warga yang dapat dikelola menjadi tempat menginap bagi tamu (*homestay*).

Untuk mewujudkan suatu kawasan wisata terpadu, tentu saja harus dibangun kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak perbankan untuk mendirikan Unit Pelayanan Keuangan berbasis online termasuk skema kredit murah bagi petani. Tidak kalah pentingnya peran pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk memprakarsai berdirinya warung-warung atau kafe berbasis kakao di pusat-pusat desa. Peluang lain yang sedang diupayakan dalam memperkuat pemberdayaan warga adalah mulai menggalang kerjasama dengan beberapa lembaga yang selama ini bekerja untuk sektor kakao di Kabupaten Luwu Utara seperti Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) dari Swisscontact, PT. Olam Indonesia, PT. Mars Symbioscience, Forum Kakao Luwu Raya, Koperasi Multi Jasa Tani, dan lembaga pendidikan seperti Universitas Hasanuddin. Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positifnya dalam bentuk kegiatan demonstration plot (demplot) atau pembinaan langsung kepada kelompok tani yang akan mengarah pada terciptanya desa sasaran sebagai desa yang masyarakatnya mampu menjadi-

kan kakao sebagai sumber pendapatan utama mereka.

Laskar Belati: Pembela Kakao dari Desa Kalotok

Laskar Belati adalah sebuah kelompok petani yang anggotanya adalah petani yang bersenjatakan belati (pisau kecil tajam) yang digunakan untuk melakukan sambung samping atau sambung pucuk di kebun-kebun kakao di sekitaran desa mereka. Proses perekrutan dan anggota dari Laskar Belati ini sangat cair, dan sistem pengambilan keputusan juga sangat sederhana. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ismail, salah seorang petani dalam kelompok ini, “*Laskar Belati ini muncul dari kebiasaan kami, bapak-bapak di sini, berkumpul di malam hari setelah dari kebun sehari. Pada saat pertemuan informal tersebut, kami biasanya membicarakan tentang persoalan kakao yang dihadapi, dan bertukar pengalaman bagaimana mengatasinya. Tidak ada hal lain yang kami bicarakan selain kakao.*” Uniknya lagi, Laskar Belati ini tidak memiliki struktur seperti organisasi-organisasi lainnya.

Menurut Drs. Jusman Triatmojo yang juga sekaligus kepala desa di desa Kalotok, pada dasarnya pembentukan kelompok atau laskar ini didasari dari rasa



Foto: Armin Hari

gotong royong warga dan keinginan untuk saling berbagi. Tidak mengherankan kemudian jika dalam keseharian Laskar Belati ini rata-rata pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan gotong royong untuk membantu anggota lainnya dalam merawat dan mengembangkan budidaya kakao di desa mereka. Pengetahuan teknis tentang tanaman kakao awalnya mereka dapatkan dari salah seorang okulator dari desa tetangga sekitar tahun 2009. Dari sanalah awalnya mereka kemudian mengembangkan sendiri pengetahuan yang mereka miliki hingga hampir semua anggota kelompok bisa melakukan sambung samping, sambung pucuk, dan mahir dalam menerapkan metode-metode perawatan kebun sebagaimana yang disarankan dalam GAP.

Pada malam-malam pertemuan informal tersebut, biasanya juga mereka berkumpul untuk membangun kebun entris atau kebun bibit yang dikerjakan

secara gotong royong. Hasilnya sekarang adalah beberapa desa tetangga, bahkan dari luar kabupaten, sudah menjadikan Desa Kalotok ini sebagai lokasi sumber bibit dan entris tanaman kakao yang dikenal dengan kualitas terbaik.

Sebagai salah satu kelompok binaan dalam Program Kampung Kakao, Desa Kalotok ini memiliki peran sentral, mengingat lokasinya yang berada di jalan poros dan sebagai pintu gerbang untuk menuju dua desa lainnya yang juga sebagai lokasi binaan dalam program ini. Oleh karenanya, menurut beberapa anggota Laskar Belati, untuk menerapkan dan mencapai keberhasilan dalam Program Kampung Kakao ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama dan utama adalah bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara harus terus ditingkatkan

dan bisa diakses oleh petani. Pelayanan tersebut bisa diejawantahkan dalam bentuk pendampingan teknis ke petani, pemberian bantuan input perkebunan, dan pembuatan sekolah lapang. Kemudian hal yang perlu segera dilakukan adalah pembuatan demonstration plot (demplot) untuk masing-masing kelompok, setidaknya dalam satu kelompok tani, harus ada dua atau tiga demplot untuk menerapkan pengetahuan teknis yang selama ini diperoleh dari pengalaman dan pendampingan dari tenaga pendamping. Namun, selama ini petani hanya mempraktekkannya langsung di kebun mereka dengan tingkat keberhasilan yang masih rendah. (CSP-AH)



Foto: Armin Hari

NAGARI MODEL KAKAO: WILAYAH PERCONTOHAN KAKAO DI SETIAP KABUPATEN/KOTA

SEKITAR tahun 2005 jauh sebelum dimulainya Program Pengembangan Kakao di Sumatera Barat, luas areal tanaman kakao secara keseluruhan 25.042 ha, dengan pencanangan program tersebut secara berangsur-ansur di setiap tahunnya meningkat hingga mencapai 200.000 ha di tahun 2015. Upaya ini dilakukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah memberikan bantuan dalam bentuk berbagai kegiatan untuk perluasan dan peremajaan, serta rehabilitasi tanaman kakao.

Seiring dengan peningkatan luasan tanaman kakao tersebut, peningkatan jumlah produksi kakao juga mengalami kenaikan yang signifikan. Menurut data dari Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat, Jika pada tahun 2005 produksi biji kakao berjumlah 14.068 ton, setelah Program Pengembangan Kakao berjalan sekitar tujuh tahun jumlahnya telah meningkat menjadi 80.001 ton pada tahun 2013. Peningkatan luasan dan jumlah produksi tanaman kakao tentu saja memberikan dampak positif bagi petani yang secara tidak langsung

memperbaiki pendapatan petani, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Saat ini rata-rata jumlah produksi kakao di Sumatra Barat berkisar kurang dari 1 ton/ha, dan tentu saja belum bisa dikatakan berhasil mencapai harapan produksi 2,5 ton/ha/tahun jika petani dikatakan telah mampu menerapkan teknologi perkebunan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, dan faktor paling penting adalah kurangnya kegiatan pemeliharaan oleh petani, seperti tidak melakukan pemupukan, pemangkasan, sanitasi, dan diperparah lagi dengan tingginya serangan hama dan penyakit. Di samping persoalan produktivitas, jaminan kualitas juga belum sesuai dengan permintaan pasar karena sebagian besar petani belum menerapkan proses pengelolaan pasca panen, seperti pengeringan dan penyimpanan, termasuk tata kelola fermentasi biji kakao.

Beranjak dari persoalan-persoalan tersebut, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perkebunan mengupayakan langkah perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kakao secara cepat dan berkelanjutan dengan membangun kawasan agrobisnis kakao percontohan dengan judul kegiatan “Pengembangan dan Pembinaan Nagari Model

Pembangunan Kakao”, atau lebih dikenal dengan istilah Nagari Model Kakao.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa nagari adalah wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu, atau bisa disebut sebagai distrik. Dalam sistem pemerintahan seperti sekarang ini, nagari adalah pembagian wilayah pemerintahan atau wilayah administratif sesudah kecamatan, dan menggantikan istilah desa, yang hanya berlaku di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Sistem kenagarian ini sudah dikenal sebelum kemerdekaan Indonesia. Sistem ini dibagi menjadi dua aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari di Minangkabau, yaitu Koto Piliang dan Bodi Caniago yang keduanya memiliki kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno. Nagari merupakan unit pemukiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat. Nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri. Selain itu beberapa kelengkapan yang mestinya dipenuhi oleh suatu pemukiman untuk menjadi nagari di antaranya adanya balai adat, masjid serta ditunjang oleh areal persawahan. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemerintah tetap menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari Model Kakao yang diterapkan di beberapa nagari di kabupaten dan kota dalam wilayah administratif Propinsi Sumatera Barat diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan selama beberapa tahun. Kegiatan tersebut diawali dengan pembuatan rancangan bangun program itu sendiri dengan melakukan kajian pada masing-masing nagari yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan balai penelitian. Nagari Model Kakao juga dibangun dengan melalui bimbingan, fasilitasi, dan pendampingan dari multi pihak dengan mengandalkan potensi nagari itu sendiri, khususnya sumber daya manusia yang dimiliki, sumber daya alam, dan kelembagaan agribisnis yang ada. Dari penerapan program ini komoditas kakao bisa menjadi motor penggerak perekonomian nagari. Hingga tahun 2014 ini, sudah terdapat 12 Nagari Model Kakao yang sudah dibangun dan masih tetap dilanjutkan pendampingannya, yaitu:

- Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.
- Nagari Kurangi Hulu, Kecamatan Sei Geringging, Kabupaten Padang Pariaman.
- Aur Kuning, Kecamatan Payakumbuh selatan, Kota Payakumbuh.
- Nagari Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota.
- Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
- Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten

Solok.

- Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam.
- Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Nagari Pasir Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kota Sawahlunto.
- Nagari Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto.
- Desa Tungkul Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, dan
- Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan Nagari Model Kakao di Sumatera Barat ini adalah pertama untuk membangun tanaman kakao yang dikelola sesuai dengan budidaya tanaman yang sehat; kedua mendorong pengembangan tanaman kakao berbasis pada nagari dengan pengelolaan sesuai teknis yang ada; ketiga mengetahui potensi pengembangan dan pembangunan kegiatan lainnya dengan usaha pembangunan kakao dari aspek integrasi kakao dengan usaha lain, begitu juga dengan pemasaran dan pengolahan hasilnya; keempat melakukan pembinaan kepada kelompok tani atau petani kakao untuk melakukan budidaya kakao sesuai teknis melalui SLPHT dan sosialisasi; dan yang terakhir untuk membangun kelembagaan petani. Pada prinsipnya, setiap Nagari Model Kakao harus memiliki 1 bidang lahan untuk demonstration plot (demplot), 1 bidang lahan untuk kebun entris, dan 1 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu

Semuanya Dimulai dari Pertemuan Koordinasi dan Sekolah Lapang

Dalam penerapan program percontohan Nagari Model Kakao di Propinsi Sumatera Barat ini, semua kegiatan diawali dengan pertemuan koordinasi yang dilakukan untuk menjaring permasalahan dan potensi, serta upaya pencarian solusi yang baik dalam pengembangan Nagari Model Kakao tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, usulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari Model Kakao di 12 kabupaten/kota yang ada mulai bermunculan. Untuk menunjang keberhasilan Nagari Model Kakao ini diperlukan adanya kerja sama dan dukungan dari lintas bidang dan lintas sektoral di pemerintahan propinsi dan kabupaten/kota.

Setelah pertemuan koordinasi dilaksanakan, ditetapkanlah beberapa unit kegiatan yang harus dilaksanakan di setiap lokasi Nagari Model Kakao. Unit kegiatan pertama adalah pemberian pelatihan sambung samping dan sambung pucuk tanaman kakao dengan ketentuan bahwa jumlah petani yang akan dilatih dari setiap lokasi adalah 25 orang dan belum pernah memperoleh pelatihan yang sama atau mengikuti sekolah lapang. Dari kegiatan inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Kakao.

Pada mulanya, SLPHT Kakao tersebut hanya dilakukan di empat lokasi yaitu Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok; Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar; Desa Tungkal Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, dan; Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Pada setiap Sekolah Lapang tersebut, dilakukan tujuh kali pertemuan dengan metode in class dan praktik lapangan, dengan bobot masing-masing 30% dan 70%. Pada pertemuan ke enam para peserta melakukan kunjungan lapangan ke kelompok tani yang sudah maju, Kelompok Tani Inovasi, Jorong, Nagari Balubuih, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota.

Selama SLPHT Kakao ini diselenggarakan, diberikan pembekalan beberapa materi penting seperti: kebijakan pembangunan perkebunan, plotting area, agro-ekosistem, analisa agro-ekosistem (AAES), sanitasi dan penyiraman, pemangkasan dan pemupukan, OPT kakao dan pengendaliannya, agen hayati, pembuatan pestisida nabati, teknik sambung samping dan sambung pucuk, teknologi panen dan pasca panen, dan pengelolaan usaha serta dinamika kelompok. Hal lain yang juga dianggap penting untuk disampaikan dalam sekolah lapang ini adalah bagaimana memanfaatkan limbah kulit kakao untuk dijadikan sebagai pakan ternak atau pupuk organik.

Sistem Sekolah Lapang Kakao ini tergolong menarik terutama pada mekanisme perekutan dan pengembangan pengetahuan petani peserta. Dari masing-masing SLPHT, pesertanya adalah 25 orang dengan komposisi 23 orang berasal dari petani atau pengurus kelompok tani dan 2 orang petugas perkebunan atau petugas PPL yang ada di masing-masing nagari tersebut. Dan setelah mengikuti sekolah lapang tadi, petani tersebut akan kembali lagi ke kelompok tani atau gabungan kelompok taninya sendiri dan mulai mengajarkan apa-apa yang telah mereka peroleh selama ini. Dan tidak mengherankan jika kemudian hampir semua anggota kelompok tani di masing-masing nagari sudah mahir dalam menerapkan good

agricultural practice (GAP), dan nagari-nagari lainnya yang tidak termasuk dalam wilayah pembinaan program Nagari Model Kakao di Propinsi Sumatera Barat juga biasanya menghubungi para anggota kelompok tani untuk mengajarkan dan memberikan pengetahuan terkait tata kelola tanaman kakao dan permasalahan yang dihadapi, dan solusi yang harus dilakukan.

Setelah Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) ini selesai dilaksanakan, baru kemudian diikuti dengan dukungan program lainnya untuk memperkuat kelompok tani di masing-masing nagari. Dukungan yang dimaksud adalah seperti pengadaan alat-alat pertanian sebagai sarana praktik kegiatan SLPHT Kakao, pengadaan poster dan infografis tentang kakao sebagai sarana penyuluhan, dan pengadaan pondok pertemuan kelompok tani di tiga Nagari Model Kakao. Kegiatan tambahan lainnya adalah mengadakan pengkajian rancang bangun Nagari Model Kakao tersebut untuk mengenali potensi dan permasalahan di masing-masing nagari dan mencari solusi bersama yang semuanya dibangun melalui pertemuan koordinasi.

Keterlibatan Multi Pihak

Nagari Model Kakao ini tidak bisa dilaksanakan secara sepahak melainkan dilaksanakan dengan keterlibatan multi pihak, menurut Ir. Yusniar, MP. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat. Keterlibatan multi pihak tersebut bisa dilihat dari partisipasi aktif Forum Kakao Sumatera Barat yang membina jaringan, melalui anggotanya, ke Universitas Andalas di Padang untuk melaksanakan kajian rancang bangun Nagari Model Kakao tersebut di beberapa nagari di Sumatera Barat. Dari hasil kajian, sekarang ini sudah tercipta pola kerja sama dengan melakukan Kuliah Kerja Tematik yang setiap periodenya diikuti oleh kurang lebih 200 orang dan disebar ke 8 lokasi Nagari Model Kakao. Kegiatan mahasiswa KKN juga memasukkan porsi 70% hingga 80% menyangkut pembinaan dan pendampingan tentang tanaman kakao terutama dari aspek

budidaya dan pasca panen. Peserta KKN ini tidak mesti adalah mahasiswa yang sedang kuliah di Jurusan Perkebunan atau Pertanian, tapi bisa diikuti oleh mahasiswa lainnya dengan latar belakang kependidikan yang berbeda. Hal yang terlebih dahulu diutamakan adalah kegiatan peningkatan wawasan dan keterampilan di bidang budidaya dan pasca panen kakao, terutama untuk GAP. Selain dibekali dengan kemampuan teknis, mereka juga didukung dengan alat-alat pertanian dan perkebunan teknis. Selain itu, melalui KKN Tematik ini, bantuan berupa bibit kakao juga disalurkan dengan jumlah 14.000 batang untuk disebar di setiap lokasi KKN di Nagari Model Kakao.

Hal lain yang dilakukan untuk keberlanjutan dukungan bagi Nagari Model Kakao adalah membangun jaringan dengan beberapa instansi kepemerintahan yang lainnya untuk diintegrasikan bersama. Misalnya saja Dinas Peternakan yang memberikan dukungan ternak yang bisa dipadukan dengan sektor kakao.

Menghidupkan Kembali Brigade Proteksi Tanaman

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan program Nagari Model Kakao ini, pihak UPTD BPT Perkebunan menghidupkan kembali gugus tugas yang dulunya pernah ada yang mereka sebut sebagai brigade proteksi tanaman kakao. Brigade ini bertugas membantu kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk menangani persoalan teknis tanaman kakao, disamping sebagai upaya pendampingan berkelanjutan untuk menggenjot peningkatan produksi dan perbaikan kualitas kakao di Sumatera Barat. Teknis pelaksanaan brigade ini siap siaga untuk membantu menyelesaikan persoalan teknis di tanaman kakao yang tidak bisa ditangani oleh petani sendiri. Prosesnya, staf brigade langsung datang ke kebun petani untuk melihat persoalan yang dihadapi petani dan mencari penyelesaiannya dengan memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan yang mereka miliki.

Menurut Ir. Yusniar, MP., setiap ada kendala yang dihadapi, petani dapat langsung menghubungi UPTD BPT Perkebunan Propinsi Sumatera Barat yang membawahi brigade ini. Petani, atau ketua kelompok tani, akan menghubungi sendiri staf brigade melalui telepon. Respon tindakan pun juga sangat cepat, laporan dari petani akan ditanggapi dalam kurun waktu kurang dari satu minggu.

Pendampingan melalui Kegiatan Survei, Pembinaan, Kunjungan Lapangan, dan Monitoring Evaluasi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi di masing-masing Nagari Model Kakao (NMK). Kegiatan ini untuk melihat bagaimana perkembangan penerapan program yang dimaksud dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani untuk pengembangan lebih lanjut. Dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada kisaran tahun 2014, dapat digambarkan perubahan produksi rata-rata petani di 10 nagari sebagai berikut:

No.	Nama Nagari	Produksi Kakao	
		Sebelum NMK	Setelah NMK
1	Nagari Sundata	800 kg/ha (2011)	> 2 ton/ha (2014)
2	Nagari Kuranji Hulu	800 kg/ha (2011)	> 1,2 ton/ha (2014)
3	Nagari Balimbing	< 600 kg/ha (2010)	1,5 ton/ha (2014)
4	Nagari Supayang	< 500 kg/ha (2012)	1,5 ton/ha (2014)
5	Nagari Guguk VIII Koto	700 kg/ha (2011)	2 ton/ha (2014)
6	Nagari Aur Kuning	700 kg/ha (2011)	2 ton/ha (2014)
7	Nagari Kubang	200 kg/ha (2013)	500 kg/ha (2014)
8	Nagari Pasia Pelangai	300 kg/ha (2013)	500 kg/ha (2014)
9	Nagari Kamang Hilir	425 kg/ha (2012)	1 ton/ha (2014)
10	Nagari Koto Baru	596 kg/ha (2012)	1 ton/ha (2014)

Sedangkan untuk Nagari Model Kakao di Kota Padang dan Kota Pariaman, peningkatan produksi belum tampak secara signifikan, karena SLPHT baru dilakukan pada tahun 2014. Namun dari aspek budidaya telah banyak memperlihatkan perubahan. Sebelum intervensi program, hampir 80% tanaman kakao yang ada di kebun petani kondisinya belum pernah dipangkas dan nampak seperti hutan kakao. Dan sekarang ini sudah mulai terlihat perubahannya dengan penerapan tata



Foto: Armin Hari

kelola perawatan tanaman kakao yang baik, atau *good agricultural practice* (GAP).

Pembelajaran yang didapat selama proses pendampingan selama ini adalah:

- Tingkat pendidikan petani sangat mempengaruhi tingkat penyerapan setiap teknologi yang disampaikan, sehingga berpengaruh juga pada penerapannya di lapangan. Pembelajaran ini berdasarkan pengalaman memantau peserta SLPHT di Kabupaten Tanah Datar tahun 2014 dengan kondisi 30% tidak dapat baca tulis dan hanya 5% yang menamatkan pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas.
- Faktor pendampingan oleh petugas di lokasi secara rutin dan terus menerus kepada petani sangat menentukan tingkat keberhasilan. Berdasarkan hasil monitoring pendampingan yang jarang dilakukan, memberikan pengaruh kurangnya motivasi petani. (CSP-AH)



Foto: Armin Hari

KAMPUNG COKELAT: OASE BARU DI KOLAKA

AWALNYA mungkin di sekitar tahun 2014. Beberapa bulan setelah Ir. H. Muhammad Bachrun Hanise, MT. dilantik sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, ia sudah mulai mengunjungi beberapa wilayah perkebunan di kabupaten ini. Salah satu daerah yang didatangi kala itu adalah Desa Unduha yang berada di daerah perbukitan yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi kakao. Dan pada saat itu, antusiasme petani untuk merawat tanaman kakaonya sudah mulai menurun karena kondisi tanaman yang sudah menua dan kurang produktif. Sebagian besar dari mereka bahkan sudah mulai berlair ke tanaman lain sebagai sumber penghasilan utama. Tanaman kakao pun mulai tidak diperhatikan.

Dalam kunjungannya tersebut, kepala dinas yang baru dilantik ini menyampaikan dukungan pemerintah daerah untuk mengembalikan semangat para petani untuk merawat tanaman berkualitas ekspor ini. Pada saat tersebut, di hadapan para petani, H. Muhammad Bachrun Hanise mengutarakan upaya pemerintah daerah untuk membangun daerah baru sebagai tujuan pariwisata yang bisa dikunjungi oleh pelancong dalam dan luar negeri yang ingin mempelajari dan menyaksikan sendiri bagaimana sebenarnya tanaman kakao dan bagaimana proses pembuatan produk cokelat. “*Sebagian besar para penikmat produk cokelat di negara-negara Eropa dan Amerika tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk melihat langsung bagaimana tanaman kakao itu sendiri, dan bagaimana proses untuk menciptakan sebuah produk cokelat.*” Demikian H. Muhammad Bachrun Hanise menjelas-

kan kepada para petani kakao kala itu. Lebih lanjut lagi, para petani juga tidak memiliki pengalaman tentang bagaimana produk cokelat itu diproses dari biji kakao yang mereka hasilkan. Bahkan, banyak petani kakao belum pernah merasakan seperti apa produk cokelat itu sendiri.

“Upaya ini adalah sangat penting untuk memperlihatkan kepada para petani tentang bagaimana biji kakao yang mereka hasilkan diproses sehingga menghasilkan produk cokelat. Ini ada-



Foto: Armin Hari

lah salah satu upaya untuk memberikan mereka semangat untuk menumbuhkan tanaman tersebut. Upaya ini juga akan memberikan mereka kepercayaan diri bahwa apa yang mereka hasilkan selama ini, mulai dari menanam hingga memanen, sangatlah penting nilainya, dan dibutuhkan oleh sebagian besar orang di muka bumi.” H. Muhammad Bachrun Hanise menambahkan. Oleh karenanya, Kampung Cokelat yang digagas ini akan menjadi sebuah titik temu bagi petani kakao dan para penikmat product cokelat di seluruh dunia untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Beberapa saat kemudian, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara ini diundang oleh petani kakao untuk melakukan demonstrasi sambung samping di daerah perkebunan di Lalombaa. Bersama dengan H.

Alimuddin dan petani kakao lainnya, ia mendemonstrasikan tentang bagaimana melakukan teknik penyambungan samping tanaman kakao di kebun di daerah tersebut. “Ketika saya mengunjungi daerah ini, ide di kepala langsung muncul. Akan sangat menarik jika daerah ini memiliki sebuah tempat yang bisa dijadikan sebagai wadah untuk saling berbagi pembelajaran, pendidikan, dan tempat rekreasi. Pada kisaran periode tersebut, Bupati Kabupaten Kolaka juga mendorong setiap instansi pemerintah, khususnya SKPD, untuk memiliki satu program inovatif. Dan itulah kemudian kenapa ide pembangunan Kampung Cokelat ini muncul.” Seperti itulah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka ini menjelaskan.

Seperti halnya ide awal pengembangan Kampung Cokelat ini sebagai etalase bagi orang-orang yang belum pernah melihat langsung tanaman ka-

kao. Bagaimana petani mengolah lahan, merawat tanaman, melakukan panen, dan bagaimana mengolah biji kakao hingga menjadi produk cokelat. Karena bisa dikatakan bahwa sebagian besar orang-orang yang selama ini mengkonsumsi cokelat tidak punya pengalaman yang berkaitan dengan tanaman. Demikian halnya juga dengan petani. Mereka juga sebenarnya belum memahami tentang bagaimana produk cokelat diproses dan dihasilkan dari biji kakao yang mereka panen. Itulah kemudian kenapa ide bahwa tempat ini akan menjadi titik temu bagi para penikmat cokelat dan petani kakao.

Petani Kakao dan Kampung Cokelat

Melalui serangkaian pembelajaran dari kampong kakao atau cokelat di beberapa tempat di Indonesia, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka meminta beberapa orang arsitek



Foto: Armin Hari



untuk membuat rencana pengembangan fasilitas ini. Proses pengembangannya kemudian pun tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang singkat. Dan dewasa ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka telah melakukan pembelian lahan seluas tiga hektar untuk pengembangan kampung cokelat ini. Selain itu, di sekitar daerah pengembangan tersebut, terdapat sekitar 500 hektar lagi yang merupakan perkebunan kakao yang dimiliki oleh petani setempat.

“Tentu saja akan sedikit menggelekan jika tempat ini disebut sebagai kampung cokelat namun tidak ada petani kakao yang beraktivitas di dalamnya.” H. Muhammad Bachrun Hanise menambahkan pemikirannya. Hal tersebutlah kemudian yang menjadikan pemerintah daerah hanya membeli tanah seluas tiga hektar untuk pengembangan fasilitas ini, dan tetap memotivasi para petani kakao di sekitar untuk tetap mengolah dan mengupayakan tanaman kakao di kebunnya. Tidak mengherankan kemudian jika tempat ini dimanfaatkan oleh mereka, khususnya para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Sekali dalam sepuluh hari, biasanya ada dua kelompok tani yang melakukan kegiatan arisan di kampung cokelat. Selain itu, mereka juga memiliki jadwal gotong royong sekali dalam satu bulan. Dalam kegiatan berkala

tersebut, mereka bahu membahu untuk bergotong royong dalam membersihkan lahan perkebunan, atau melakukan perlakuan kepada tanaman anggota kelompok.

Ide tentang etalase dan titik temu pembelajaran, kampung cokelat ini diharapkan akan memperlihatkan percobaan integrasi hewan ternak, khususnya kambing, dengan tanaman kakao. Seresah dan kulit buah kakao bisa dijadikan sebagai bahan pakan bagi hewan ternak, dan petani juga bisa memproduksi energi bio-gas, dan ampasnya bisa dijadikan sebagai pupuk.

Pengembangan di Masa Depan

Kampung cokelat Kabupaten Kolaka ini masih dalam proses pengembangannya. Dan sebagai etalase, fasilitas ini memproduksi produk cokelat dengan melakukan proses pengolahan biji kakao yang diperoleh dari daerah ini. Hanya saja skala produksinya masih rendah karena mesin proses masih sangat terbatas. Produk olahan tersebut pun juga hanya dijadikan sebagai oleh-oleh bagi tamu yang mengunjungi tempat ini, dan jumlahnya belum bisa untuk dijual ke masyarakat umum.

Di masa mendatang, Kampung Cokelat Kabupaten Kolaka ini akan menjadi salah satu tujuan terpadu. Di sekitar

pinggiran sungai, yang dijadikan sebagai pintu gerbang, akan dikembangkan menjadi daerah pusat kuliner. Fasilitas ini juga akan dilengkapi dengan tantang kegiatan di luar lapangan yang bisa menarik perhatian instansi pemerintah dan perbankan untuk melakukan kegiatan seperti kunjungan lapangan, perkumpulan keluarga, dan *outbound*. Selain itu, penginapan juga akan dibangun bagi tamu yang ingin menginap di dalam kampung cokelat.

“Sebagai tempat bertemunya para petani dan penikmat cokelat, Kampung Cokelat juga akan dilengkapi dengan ruang pertemuan. Dan pemerintah daerah sangat mendukung ide ini. Namun dengan keterbatasan pendanaan, maka pembangunannya kami lakukan dengan perlahan. Fasilitas pendukung tentu saja akan dibangun satu per satu. Namun, ini adalah prioritas pemerintah daerah.” Sebagaimana disampaikan oleh stated by H. Muhammad Bachrun Hanise sambil memperlihatkan tanaman-tanaman kakao di dalam wilayah Kampung Cokelat.

Fasilitas ini akan menjadi daerah tujuan yang baru di Kabupaten Kolaka. Dan ide tentang daerah terpadu sebagai tempat berbagi pengetahuan dan pengalaman antar petani, dan antara petani dengan penikmat cokelat. Kampung Cokelat ini akan menjadi laboratorium lapangan bagi petani dalam mengembangkan tanaman kakao mereka di masa mendatang. (CSO-AH)



PELATIHAN PERANCANGAN DAN PENULISAN MEDIA PUBLIKASI BAGI SEKRETARIAT FORUM KAKAO DAERAH



COCOA Sustainability Partnership (CSP) menggelar pelatihan merancang dan menulis sebagai wujud nyata pengelolaan dan pengembangan media publikasi yang akan dihasilkan oleh Forum Kakao Daerah (FKD). Acara ini digelar selama dua hari di Jakarta dan dihadiri oleh masing-masing dua orang perwakilan forum, yakni Forum Kakao Kolaka (FOKA), Forum Kakao Aceh (FKA), Forum Kakao Sumatera Barat, Forum Komunikasi Kakao Sulawesi Tengah, dan Forum Masyarakat Kakao Luwu Raya.

Setiap harinya, para peserta pelatihan mengikuti kegiatan semenjak pagi hari, hingga sore hari. Toha Arifin dari Cocoa Sustainability Partnership membuka kegiatan ini sekaligus menjelaskan

maksud dan tujuan kegiatan. Selain itu, harapan para peserta pelatihan juga dipetakan. Dan sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu membekali pengetahuan para pengurus dan staf sekretariat forum dengan kemampuan menulis, mengetahui teknik penulisan, struktur penulisan, penggalian bahan tulisan, dan bagaimana memilih judul yang bisa menarik perhatian para pembaca.

Mengingat FKD adalah sebuah lembaga yang ada di daerah dan menghimpu berbagai informasi, mulai dari cara menanam kakao, merawat, memupuk, sampai pada tahap menjual biji kakao yang sudah kering. Dan informasi tersebut haruslah dikelas dalam bentuk tulis-

an atau berita. Maka inilah pentingnya sebuah lembaga untuk mengetahui bagaimana cara menulis, baik itu artikel, feature, esai, berita dan sebagainya.
(Forum Kakao Kolaka/Amiruddin Amier)



PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN BUDI DAYA BERKELANJUTAN DAN PASCA PANEN KAKAO

SETELAH pertemuan perdamaian anggota tim penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao di Gedung Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tanggal 26 Juni 2017 silam, anggota tim kembali berkumpul dalam proses penulisan dan penyusunan di Puslitkoka, Jember, Jawa Timur. Para penulis yang merupakan staf Widya Iswara didukung penuh oleh para ahli kakao dalam proses ini.

Pada hari pertama, tim penyusun bertemu dengan Dr. Agung Wahyu Susilo, SP., MP., dan staf Puslitkoka lainnya untuk menentukan dan menyepakati jadwal dan agenda proses penulisan dan penyusunan kurikulum dan modul pelatihan ini dalam kurun waktu tiga hari mendatang (23 - 25 Agustus 2017). Selain itu, Puslitkoka juga mempersiapkan dukungan dalam bentuk fasilitasi dan pendampingan dari para ahli kakao

untuk masing-masing kelompok tim penyusun, yakni kelompok budi daya, hama dan penyakit, dan kegiatan pasca panen. Dalam kesempatan ini juga, Puslitkoka juga menyediakan referensi guna memperkaya wawasan dan pemahaman tentang budi daya kakao dan kegiatan pasca panen bagi para anggota tim penulis.

Sebagai bagian dari proses penyusunan kurikulum dan modul pelatihan, anggota tim juga diajak untuk mengunjungi kebun-kebun kakao yang dimiliki Puslitkoka untuk memperoleh pengetahuan tentang budi daya kakao dan kegiatan pasca panen. Setelah kegiatan tersebut, semua kelompok kemudian mulai melakukan proses penulisan dan penyusunan kurikulum dan modul pelatihan budi daya berkelanjutan dan pasca panen kakao bersama para ahli kakao dari Puslitkoka untuk beberapa

hari ke depannya.

Kurikulum dan modul pelatihan ini diupayakan dalam tahun ini oleh Cocoa Sustainability Partnership bersama dukungan aktif para anggotanya. Materi ini nantinya akan digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian dalam memberikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi para penyuluh lapangan.

PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL (SKKNI) BIDANG KAKAO YANG BERKELANJUTAN



Foto: Armin Hari

Foto: Armin Hari

SEBAGAI wujud nyata perencanaan Cocoa Sustainability Partnership bersama dengan para anggota dan pemangku kepentingan lainnya di sektor kakao, di tahun 2017 akan dihasilkan Kurikulum dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao. Untuk menuju perampungan kurikulum dan modul pelatihan tersebut, maka hal pertama yang harus diselesaikan adalah Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Budi Daya Kakao Berkelanjutan.

Selama tiga hari, para anggota tim perumus rancangan SKKNI berkumpul di Bogor, Jawa Barat, untuk menghasilkan rancangan pertama standar kompetensi kerja yang dimaksud. Selain itu, pihak Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, juga terlibat sangat aktif dalam proses perancangan ini.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc, menekankan bahwa kegiatan ini adalah bentuk penjabaran yang nyata dalam hal kerja keras kita semua pada upaya pengembangan pertanian di Indonesia, khususnya sektor perkebunan kakao. Lebih lanjut dikatakan bahwa harapan yang hendak dicapai dalam penerapan Kurikulum dan Modul Pelatihan, dan SKKNI Bidang Budi Daya Kakao Berkelanjutan ini adalah bahwa Indonesia nantinya tidak hanya mampu memproduksi bahan baku saja, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi pengolahan yang menghasilkan produk akhir berkualitas tinggi.

“Tujuan SKKNI ini adalah bagaimana mempersiapkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia, khususnya generasi muda, di sektor kakao agar bisa memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa bersaing di pasar bebas.” Demikian Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc. memberikan arahannya pada pembukaan lokalatih penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Budi Daya Kakao Berkelanjutan.

Di kesempatan yang sama, Imam Suharto selaku Ketua Dewan Pengawas Cocoa Sustainability Partnership menyampaikan bahwa program penyusunan kurikulum dan modul pelatihan, dan SKKNI ini adalah bagian dari inisiatif sinergi yang telah dibangun oleh CSP bersama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. “CSP tentu saja mengharapkan agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan SKKNI ini bisa memberikan dukungannya pada proses penerapannya nanti.”

Standar kompetensi ini sendiri terdiri dari tigapuluh tiga standar yang melengkapi kegiatan mulai dari persiapan lahan, hingga pasca panen.

Sesuai dengan harapan sebelumnya, pada akhir lokalatih penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Budi Daya Kakao Berkelanjutan ini bisa diselesaikan. Dan rancangan pertamanya akan dibahas kemudian di pelaksanaan kegiatan berikutnya. (CSP)



Rekomendasi Audit Eksternal COCOA SUSTAINABILITY PARTNERSHIP ADALAH LEMBAGA TERPERCAYA

PADA akhir Agustus 2017 ini, sebagai lembaga yang terdaftar secara hukum, Cocoa Sustainability Partnership melakukan audit eksternal untuk beberapa jenis kegiatan. Khususnya prosedur administrasi dan keuangan. Audit eksternal ini adalah kali kedua dilaksanakan oleh PwC Indonesia.

Selama beberapa hari, konsultan audit melakukan pemeriksaan secara cermat pada pencatatan administrasi dan keuangan yang selama ini dilaksanakan di kantor eksekutif CSP. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, PwC Indonesia memberikan penilaian yang sangat baik kepada CSP. Namun, seperti layaknya audit eksternal yang dilakukan, masih ada beberapa temuan yang dianggap perlu untuk diperhatikan di kemudian hari. Beberapa isu tersebut adalah sebagai berikut:

- **Tidak ada segregasi tugas dan tanggung jawab untuk pembuatan jurnal keuangan.**

Berdasarkan dari contoh kasus keuangan yang diperiksa, ditemukan bahwa ada beberapa jurnal keuangan yang

dilakukan tanpa adanya peninjau ulangan, atau disetujui, oleh orang lain yang memiliki kuasa dan tanggung jawab. Hal ini disebabkan karena semua jurnal keuangan yang dilakukan setelah tanggal 14 Juni 2017 hanya melalui satu orang saja, yang semestinya harus ada orang lain yang memeriksanya kembali dan menyetujui transaksi jurnal keuangan tersebut. Padahal transaksi jurnal keuangan sebelum tanggal tersebut masih ada orang lain yang memeriksa dan menyetujuinya, yakni Direktur Eksekutif. Tetapi setelah kekosongan posisi, semua transaksi jurnal keuangan hanya dilakukan oleh satu orang saja.

PwC Indonesia kemudian merekomendasikan agar pihak manajemen untuk segera mengisi posisi Direktur Eksekutif yang kosong selama ini guna melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas jurnal keuangan yang dilakukan oleh Manajer Keuangan. Hal ini diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan transaksi.



- Dokumen pendukung untuk pengadaan barang dan jasa belum lengkap.**

Dalam proses pengadaan barang dan jasa yang didasarkan pada prosedur standar, ada beberapa dokumen pendukung yang harus dipenuhi. Misalnya saja permintaan pengadaan, analisis penawaran, perintah pengadaan, pencatatan penerimaan barang, perintah pembayaran, formulir permintaan pembayaran, rencana pengeluaran, dan bukti permintaan pembayaran untuk pencatatan jurnal keuangan. Namun dari pemeriksaan yang dilakukan, ada beberapa proses pengadaan barang dan jasa yang belum dilengkapi dokumen pendukungnya tersebut.

Rekomendasi yang diberikan adalah bahwa setiap proses pengadaan barang dan jasa haruslah dileng-

kapi dokumen pendukung tersebut guna menghindari terjadinya risiko pengadaan barang dan jasa yang tujuannya bukan untuk keperluan operasional kegiatan kantor.

- Tidak ada proses penawaran untuk pengadaan jasa konsultan.**

Berdasarkan prosedur standar, semua pengadaan barang dan jasa haruslah melalui proses penawaran yang dibuktikan dengan formulir analisis penawaran. Namun, ada dua temuan transaksi yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung tersebut untuk pengadaan jasa konsultan.

Dan sesuai dengan konfirmasi dari pihak manajemen dan Dewan Pengawas, dikatakan bahwa hal tersebut terjadi karena kedua transaksi harus segera diselesaikan atas

pertimbangan alokasi waktu yang sangat sempit.

Jika dilihat secara keseluruhan, proses audit eksternal ini tidak menemukan hal yang sangat krusial pada wilayah transaksi keuangan dan proses administrasi yang dijalankan oleh CSP selama ini. Demikian pula halnya dengan audit eksternal pertama yang juga dilakukan oleh lembaga audit yang sama. Tentu saja ini adalah masukan yang sangat berarti untuk segera diterapkan di kemudian hari. Dan ini semakin menunjukkan bahwa Cocoa Sustainability Partnership sebagai lembaga yang diakui hukum memiliki sistem transaksi keuangan dan administrasi yang dipandang terpercaya secara publik. (CSP-AH)

ENGLISH SECTION

35

Engaging Youths into
Sustainable Cacao
Production

38

Increasing Stakeholder
Support to Engage Youth
into Sustainable Cocoa
Production

40

A Young Farmer
Leading the Future of
Cocoa

42

Development on
Strategy of Access
Improvement to
Planting Materials

46

Learnings from
Cacao Village
at Three Cacao
Production Centers
In Indonesia



57

Training in Designing
and Writing the
Publication Media

58

Drafting the Curriculum
and Training Module
for Sustainable Cocoa
Cultivation and Post
Harvest

59

Drafting the National
Working Competency
Standard (Skkni) for
Sustainable Cacao
Cultivation

ROLE OF YOUTH AND COMMUNITY IN DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE COCOA IN INDONESIA

IT is undeniable truth. Indonesia had been gifted with abundance rich of natural resources. It is then well-known as agricultural country.

Agriculture, or plantation, is a primary sector within the economics of Indonesia by contributing more than a half of total national income for years, and as the main supporting sector for our export activities. And from those commodities lists, cacao is in the up-section position.

With these abundance potential, in the field we are still easily witnessing the aged plants, and had not been cultivated maximally. The under 40 years old farmers portion, furthermore, is very low and hardly to be found in the rural areas. Where did they go? Abandoning the rural areas for the brightness light of urban areas is referred as better destination, and for being magnified. It is the thought of for those youth who are leaving their land in the rural areas.

Regarding this issue, Cocoa Sustainability Partnership, as the national platform for sustainable cocoa in Indonesia, is working with its members to establish a condition which attracts the interest of youths to contribute on plantation sektor. One of the activities is by conducting national seminar on how to enhance the support of cocoa stakeholders to engage youths into sustainable cocoa production. Some young and successful farmers are presented to share their experience.

Beberapa rekomendasi dari kegiatan tersebut dipaparkan secara rinci dalam terbitan kali ini. Proses diskusi yang diikuti oleh peserta sangatlah cair sehingga bisa memberikan saran terhadap persoalan yang dihadapi. Pihak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pun turut dihadirkan. Titik temu pengalaman di lapangan dengan dukungan kebijakan dari pemerintah diramu menjadi beberapa catatan penting dari pelaksanaan seminar ini.

Moreover, it is important to see the role of Regional Cocoa Forum with the local government in revitalizing the development of sustainable cocoa in Indonesia. The entry point which aimed by Redactional Team of COKELAT in seeking the path is by studying three different cocoa village, or chocolate village, in three areas of cocoa production centers in Indonesia.

The stories of development and the interaction amoing cocoa stakeholders, especially cocoa farmers, are the interesting point during the visits. The hopes of the revitalization of cocoa in these areas are strongly expressed by them. These cocoa villages are referred as field laboratories that unify the cocoa farmers and chocolate enthusiasts to share their knowledge and experience. The technical supports to the farmers are also expected to be occurred. The flow of knowledge transfer to the farmers will also empower them in cultivating their lands in the future.

In the closing section, Redactional Team of COKELAT also describes the summary of drafting activities for two important documents this year, i.e. Curriculum and Training Modules for Sustainable Cocoa Cultivation and Post-Harvest, and the National Working Competency Standards for Sustainable Cocoa Cultivation. These two documents will act as legal reference materials in conducting the training to the trainers and extension staffs in Indonesia. (CSP/AH)



Foto: Armin Haji

National Seminar ENGAGING YOUTHS INTO SUSTAINABLE CACAO PRODUCTION

COCOA Sustainability Partnership gathers all stakeholders in cocoa sector, especially young agri-entrepreneur, government, cocoa and chocolate processing factories, academicians, and program implementers of cocoa development and youth empowerment, into a national seminar entitled as “Enhancing Stakeholders Support to Engage Youth into Sustainable Cocoa Production.” This seminar formulates the recommendation that can be followed-up by the cocoa stakeholders in stressing out the steps and roles of each party.

By inviting the speakers and resource persons with wide experience and knowledge on studies of youths and its relation to farming and agriculture sectors, this seminar is expected can identify the updated conditions, particularly the government policy and programs in engaging youth into agriculture sectors. Furthermore, the seminar is also aimed as a scope for sharing the best practices and lesson-learnt of youth participation in agriculture sector, improving the understanding of cocoa value chain which is potential for

youths, and to develop recommendations for all stakeholders in engaging the interest of youth to be able participated in agriculture sectors, especially for sustainable cocoa sector in Indonesia.

Indonesia as the third largest cocoa production in the world, after Ivory Coast and Ghana, since 2000 had experienced decreasing in value of domestic cocoa production and productivity. It can be declared that with this decreasing production and productivity, we had lost approximately 30% from total value of domestic cocoa production. The cocoa sector in this country is a strategic commodity where about 1.7 million of smallholders cocoa farmers gain income for their livelihoods. The decreasing value of cocoa production and productivity is caused by several main factors, such as aging plantation and plantation diseases.

Moreover, the age of those farmers are more than 45 years old in average, and it needs to be anticipated by stimulating youths to work in cocoa sectors. The urbanization



and interest to work at the farming are the main obstacles in accelerating the changes in cocoa sectors. The interest of youth to work in the rural areas is also decreasing, then most of them are staying in the urban areas with a reason for better and decent income sources. The productive lands in the rural areas are abandoned and not optimally cultivated. The aging plantations are not well-treated by the farmers who are not young anymore. The choice of being farmers is regarded as less interest one for youths.

"The cocoa sector is a significant one for the government. Thus, we, as government, are always affording to increase the focuses of government on

this sector, including the supports that can improve the interest of youths to cocoa sectors. Some government programs had been designed to increase the participation of youths into this sector," as Ir. Bambang, MM., Director General of Estate Crop, Ministry of Agriculture, said. He is stressing out that in stimulating the youths in cocoa sectors, it needs breakthrough which is applicable with the farmers' aspiration. He also cites that the business model is changed from conventional to a movement of instituted community economic development, as LEM (Lembaga Ekonomi Masyarakat/Community Economic Organization). And this organization should be supported with technology package to stimulate the business

growth.

"Improving the interest of youth toward cocoa sectors is one of the targets of 2020 Roadmap for Sustainable Indonesian Cocoa of CSP, aside to double the Indonesian cocoa production and productivity," Rini Indrayanti, when she was the Executive Director of CSP, said. *"The youth is key stakeholders in ensuring the sustainability of Indonesian cocoa sector in the future. CSP as national platform for public-private partnership for development of sustainable cocoa in Indonesia, observes that the concern of stakeholders which had been established until now needs to be improved its role in supporting the efforts in mobilizing the*



Foto: Armin Hari

youths to make cocoa sector as competitive sector and profit economical benefits for them in order to provide interest for youth to be engaged into this sector."

From the presentations of the speakers and resource persons, it can be withdrawn the problem that is experienced by youth is the lack of access to land, information, knowledge, financial, and less support from various parties. Furthermore, it is shown that the interest and willingness of youth to be engaged into agriculture sector, especially cacao, are still high.

Samsul Haris, 21 years old, one of the key young farmers who shares his experience in this session, convinces that cacao can provide him a decent life. But, he knows that in order to achieve this condition, it needs hard work as his parents had performed. The success of his parents had stimulated him to participate in cultivating cacao in his village. Samsul had planted cacao by himself on one hectare land as legacy from his parents in Limboro Rambu-Rambu Village, District of Majene, West Sulawesi. "*I am lucky that my parents had given me a land, but I don't have any work capital. In order to gain this financial support, I work to help my parents in their land, and the income that I gain then I invest it to my land,*"

Samsul who is pursuing his degree at University of West Sulawesi said. His dreams is to be a successful farmer and taking part in developing his village.

Masnawati, 22 years old, who is also sharing her experience as key young farmer, had initiated her planting materials garden since she was graduated from SMK 1 Tomoni, District of East Luwu, South Sulawesi, in 2012. The result of the garden had supported her in achieving the bachelor degree of Politani Pangkep. Her dream is to develop her planting materials garden and to start the farming equipment store, aside of keeping the cocoa productivity in her land, more than one ton per hectare.





National Seminar Recommendation INCREASING STAKEHOLDER SUPPORT TO ENGAGE YOUTH INTO SUSTAINABLE COCOA PRODUCTION

DURING the national workshop which was entitled as Increasing Stakeholder Support to Engage Young Generation in Sustainable Cocoa Production, the participants of discussion sessions had been encouraged to provide conclusions and recommendations. The participants itself are the key stakeholders representatives from national and local government institutions, industries, experts, students, and young farmers.

By working in small group discussions, the conclusions and recommendations are:

- Encourage and provide support through formal and non-formal education programs.
- Increase youth motivation to get involved in the cocoa sector by providing incentives, not only in the form of funding but can be in the form of internship, training, certification, etc.
- Encourage and create communication portals through

social media as a medium for information sharing and learning.

- The need for policies from governments and stakeholders to provide access to land. One idea is to utilize government, BUMN and BMUD's land for cocoa farming by youth.
- Re-branding the agricultural sector as a professional job should be one of the stakeholders' considerations to attract young generation.
- Encouraging strong and self-sustaining farmer institutions so that young farmers can be considered bankable.
- Stakeholders both from government and private sector, especially research institutions provide encouragement and information to young farmers who will do business in cocoa sector.
- Develop financial institutions at the village level.
- This workshop is a momentum to inspire and motivate farmers and stakeholders to be aware and work hard to



restore cocoa booming days to the prosperity of cocoa farmers in Indonesia.

- With the enormous natural resource potential in each village, the youth has a role to participate and encourage farmers to utilize the potential of natural resources optimally. Therefore, synergy between farmers, business actors and the banking sector is needed to generate agriculture sector in villages.
- Strengthening farmer institutions to organize business activities in rural areas is one of the efforts to prepare farmers to be bankable. When farmers are bankable, various business activities in rural areas can be developed.
- The Ministry of Agriculture will pay maximum attention and support to farmers to implement a competitive and eco-friendly plantation management system that will provide farmers welfare/prosperity.
- The key to build smallholder plantations is institution and strong and professional human resources.
- Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM/Community Economic Institution) Sejahtera conducts farming development with collectivity and connectivity of plantation products that spread throughout the villages. Establish farmer institution in one village interconnected with other villages within a sub-district up to a district and a province.
- LEM Sejahtera organization will be filled by the best youth who have passed the selection process of leader-



Foto: Armin Hari

ship competence and ability to run a business.

- Youths should be leaders in their villages and encourage other farmers to be institutionalized and prepare farmers to be bankable.
- Through LEM Sejahtera, existing agricultural sectors in rural areas will be able to grow in line with the strengthening of farmer institutions in village.
- The image attached to workers in the agricultural sector is currently considered less attractive, but the image will decrease if income received from agricultural sector is improved.
- Some programs from the Ministry of Agriculture to increase youth involvement into the agricultural sector are to provide capital access for entrepreneurship and to provide guidance for strengthening farmer institutions. In addition, there is also internships and free training at the agricultural training center.
- To improve human resources, the Agricultural Training Center in collaboration with CSP will develop a National Curriculum for Sustainable Cocoa Training.
- This curriculum will be a resource for the training of field extension workers.
- The Agricultural Training Center will conduct scaling up of the Rural Empowerment Agriculture Development (READ) project, the program will work with local governments such as South Sulawesi Province, Southeast Provinces. In addition, Puslatan will also work with CSP members for development of cocoa sector.



Foto: Armin Hari



Muhammad Iqbal A YOUNG FARMER LEADING THE FUTURE OF COCOA

MUHAMMAD Iqbal (26) spends most of his days at the District Cocoa Clinic (DCC) Bireuen where the Perkebunan Kakao Bireuen Cooperative (KPKB) is stationed. He completed his first GAP trainings in 2010 and was supposed to finish his tertiary studies in 2015. After postponing his studies to support his family through cocoa farming, he has recently resumed his tertiary studies on agri-business and sustainable farming.

He started with just 400 cacao trees and 56 coconut trees that he used as shade trees. While he may not have a lot of land, in his opinion, land size does not determine high yields and quality, rather, it is how the trees are maintained. He proves that cocoa farming is not just for the older generations and has become an example of what professional cocoa farming can achieve.

Stepping into the Unknown In 2010, Iqbal joined with Swisscontact through the Aceh Cocoa Economy Improvement Program (PEKA) and participated in the first batch of Training

of Trainers (ToT) held in his village of Juli Mee Teungoh, Bireuen. After the training, he committed to rehabilitating his ageing cacao trees that were first planted in 1992 by his parents. “At that time, my fellow farmers responded negatively to what I was doing because they had no clue about these agricultural practices yet. I was convinced that it would work and my farm would improve,” elaborates Iqbal.

His annual production before the PEKA intervention was just 350 kg per year. Since then, he has more than doubled his production to 910 kg per year as per the December 2016 records. Now, many fellow farmers come to his farm for budwood so they can side-graft the planting material onto their cacao trees to improve their own production. Furthermore, he also produces seedlings on request and sells them with various prices ranging from IDR 3,000 to IDR 7,000 per polybag.



Leadership and Cooperation

Iqbal's involvement with Swisscontact was continued through SCPP after the completion of PEKA in 2012. He then became a facilitator in SCPP's outreach project held in Bireuen. In 2013, Iqbal was selected to become a member of the Internal Management System (IMS) in the UTZ certification program. Two years later, Iqbal became the manager of Perkebunan Kakao Bireuen Cooperative (KPKB), which was established in May 2015.

Currently, Iqbal dedicates most of his time to IMS activities and managing the cooperative's business units. He also acts as the quality controller, earning him an additional IDR 75 per kg. In 2016, with support from JeBe Koko, Iqbal received Good Business Practices (GBP) training on IMS, traceability and certification. Bean trade has become one of the main sources of income for the KPKB and Iqbal himself. As a manager he is entitled to receive 13% from the profits of annual bean sales made by the cooperative. He expects to receive around IDR 15 - 20 million (USD 1,126 - 1,500) from the total trade in

2016. KPKB's high quality cocoa beans caught the attention of PT. Pipiltin based in Jakarta, so now there is a special contract where Pipiltin pays a price premium of about 60% per kg of single origin beans. This year, Iqbal has been able to earn IDR 14.8 million from selling 315.5 kg of his high quality beans, which is not including regular bean sales or his additional income from his nursery, quality control and role as manager.

Thanks to his understanding of the complexity of growing cocoa, Iqbal was invited to travel to Jakarta on the 22nd of November 2016. There, he was awarded 3rd place for the best quality cocoa beans at a national competition in honor of the 4th annual Indonesian Cocoa Day.

"I am now able to pay my sister's and my own university tuition fees and support my entire family." As he mentioned.





National Seminar Nasional **DEVELOPMENT ON STRATEGY OF ACCESS IMPROVEMENT TO PLANTING MATERIALS**

AS mandate of this year, Cocoa Sustainability Partnership conducted national workshop on cacao planting material. The activity was held in Jakarta on August 8, 2017 by presenting the key stakeholders at cocoa sector. The workshop was implemented in order to achieve the objectives of (1) ensure all farmers have access to certified suitable planting material (referred to local adaptation); (2) support seed gardens, bud wood gardens, and nurseries to meet the standard of planting material according to national government regulation (Minister of Agriculture Decree No. 50/Permentan/KB.020/9/2015 on Production, Distribution, Certification, and Supervision of Plantation Seeds, and Minister of Agriculture Regulation No. 314/Kpts/KB.020/10/2015 on Guidelines of Production, Certification, Distribution, and Supervision of Cacao Plantation Seeds); and (3) align the strategy among cocoa stakeholders, especially government, farmer, and industry sector.

The first session of the workshop served as a knowledge and experience sharing session where current government policy on planting material program, implementation of the policy, the method of planting material propagation, and current situation on nursery business and impact of the policy was presented. In order to describe this issue, the expert and resource persons are presented. Ir. Hj. Rosmi Kantao, MM., Head of UPT Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perkebunan/BSPMBP Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan delivers the socialization on Kementerian No. 314/Kpts/KB.020/10/2015 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao, Dr. Agung Wahyu Susilo, SP, MP., as the representative of Indonesian Coffee and Cacao Research Indonesia, discusses about the cacao planting materials and nursery processes.

In order to provide description on the implementation of these government policies, two cacao farmers who are working on nursery business also present their experience.



Foto: Armin Hari

Endrianto of Kakao Sinar Jaya Cooperatives of Lampung portrays his knowledge on the development of qualified and certified nursery in Lampung. Furthermore, Jono from Sukses Farmer Group of East Kolaka delivers the development of smallholder cacao nursery.

In the second session, the participant was divided into three working groups with different themes to discuss on current issues and come up with plan and recommendations. The details of plan and recommendation are described as follows:

- The socialization of Minister of Agriculture Decree No. 50/Permentan/KB.020/9/2015, and Minister of Agriculture Regulation No. 314/Kpts/KB.020/10/2015 to the farmers and related stakeholders are highly needed.
- These policies are still can be revised. But the important things are how to identify which components that become burden of this certification policy. If the problems are identified, then the inputs and suggestion of revision can be proposed to the Ministry of Agriculture.
- In the regional and local level,

UPTD and government services at district and provincial level can propose to the Ministry of Agriculture to develop and construct nursery facilities at local area. But beforehand, there some requirements to be prepared. For instance, the inventory of potential planting material sources, or the width of land for the nursery that must be proposed. The inventory data must consists of location, capacity, and type of available cacao clones. Moreover, the local government also needs to establish strong regional organization, or nursery institution (UPTD of Seed Distribution).

As for the recommendations to support producer to meet the standard of planting material according to national government are described below:

- Short Term:
 - Optimizing socialization through dissemination for Permentan No. 50/2015 and Kepmentan No. 314/2015 to all extension services, farmers, farmer groups and Gapoktan in all cocoa areas through the

agency that handles estates and implementers in the field.

- SOP on guidelines on Production, Certification, Distribution, and Supervision of Cocoa Planting material (Permentan No. 50/2015 and Kepmentan No. 314/2015) became one of the thematic themes of discussion in the activities of farmer groups and Gapoktan.
- Collecting data on all local nurseries that already exists in the CSP members area. With the data, CSP will propose/negotiate with Dirjenbun to give special policy for the existing nursery to get certification. Hopefully the Dirjenbun also can give win-win solution on transition time for the local nursery to meet the standard according to Kepmentan No. 314/2015.
- Trigger and develop the interest of potential nursery producers through clear nursery business analysis, market clarity information, and the stages of certification submission.
- Strengthen the farmer's institution in order to facilitate the collective management of certification.
- Long Term:
 - Creating a transitional period for nurseries to meet the Kepmentan no. 314/2015 requirements.
 - Continuing assistance by all stakeholders (Govt, ICCRI, Private sector, NGO) to farmers to implement the SOP.

Recommendations on how farmers can easily access the certified cocoa planting material to fulfill their needs are as follows:

- Short Term:
 - Provide access to information on certification cost requirements to farmers/



producers. The cost is quite expensive for small producers.

- Coordinate with the MoA and local governments for existing local nurseries can be included in government programs in the provision of planting material in 2017 and 2018.
- Strengthen production and marketing channels network.
- Strengthen and empower the farmer's institution.
- Long Term:
 - Province/District/UPTD propose to MoA to build planting material sourced in their area.
 - The government acts as a stimulator and regulator in developing a pro-farmer seed system (Program Desa Mandiri Benih).

Recommendation on Business Model

Generally, the government had issued model and scheme for nursery business which is regulated in some policies. The scheme is as in Figure 01. Based on this government model, it will give more burden to the smallholder nursery model. And the recommended scheme as for the ideal business model for the farmers is as described in Figure 02.

There are two business models than can be developed, i.e. franchise and contractual based. The institutions, corporation or cooperatives, can establish cooperation with the planting material sources in term of contract or MoU. But the problem is if the farmers groups have not possessed law foundations.

Figure 01: Government Model of Nursery Process

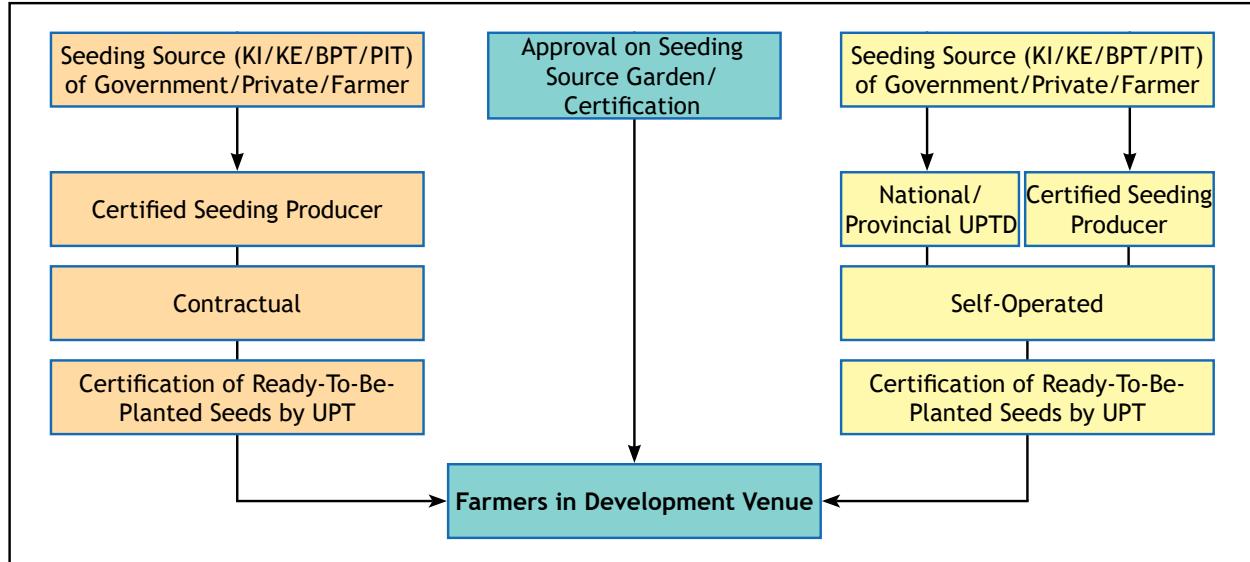
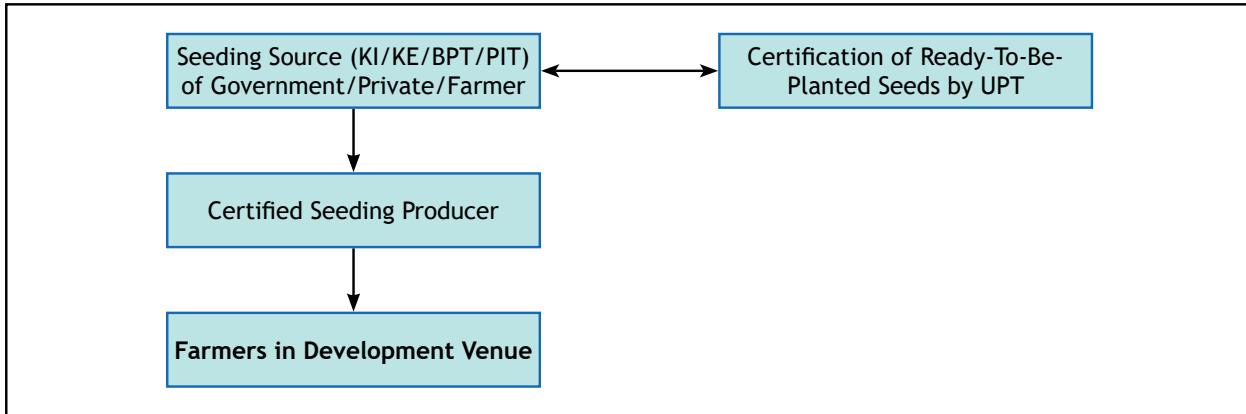


Figure 02: Ideal Model of Nursery Business



Below is the comparison table for both business models.

Business Model	Plus	Minus
Franchise	<ul style="list-style-type: none"> Sustainable coaching. Update info and product. Payments can be more flexible. Certainty of supply. Marketing cooperation. Eligibility check. 	<ul style="list-style-type: none"> There is a franchise fee. Farmer groups need to build a reputation, and it will be difficult for new players. There are required requirements and takes long process.
Contractual	<ul style="list-style-type: none"> No fee. The process is faster. Terms are easier. Coaching. 	<ul style="list-style-type: none"> Need a down payment (50%). Difficult to get supply certainty. Payment if more stringent.

Aligning the the Concept of Existing Business Models with Government Policy

In short term, the proposed recommendation is business model with contractual based system. It will be possible to ensure supply certainty, business model by using contract/MOU between corporation with cooperatives. As long the contents of the contract are clear and provide benefits for both sides.

And for medium term, it is important to start to establish nursery business model with franchise and contractual based system. Lastly, for long term, the first thing to create is the budwood garden (Kebun Induk) and entres garden (Kebun Entres) must be constructed in the center production of cacao areas.



LEARNINGS FROM CACAO VILLAGE AT THREE CACAO PRODUCTION CENTERS IN INDONESIA

SO many countries, so many customs. This proverbs may represents several initiatives of farmer groups and local government as an effort to increase the productivity of cocoa in their respective areas. In order to prepare the implementation of Sustainable Cocoa Development Program, some local governments in cocoa production centers try to implement initiatives to develop the cocoa development in the form of cocoa Kampung Kakao, or Cocoa Village. In applying the model of the Cocoa Village, the farmers who are members of farmer groups at the village level, trying to revive the spirit of farming and rearranging their hopes on the cocoa crops.

Here is a profound review of the three different models of Cocoa Village in three districts in Indonesia. On the occasion, COKELAT team has opportunity to visit three approaches of cocoa villages in three different places. Cocoa Model Nagari in Nagari Guguk VIII Koto, Guguk Sub-district, Limapuluh Kota District, West Sumatra Province; Kampung

Kakao in Kalotok, Sabbang Sub-district, North Luwu District, South Sulawesi Province; and Kampung Cokelat at Lalombaa, Kolaka Sub-district, Southeast Sulawesi Province.



Foto: Armin Hari

KAMPUNG KAKAO: REVITALIZATION OF NORTH LUWU CACAO

EVER since, if we are talking about cocoa in Sulawesi, Masamba and North Luwu names will appear as the largest cocoa producing regions. That was before some problems of the cocoa could not be settled by farmers appear such as: condition of old plants, pests and diseases, and the ability of farmers to access agro-inputs. Some efforts were initiated by relevant parties, such as the introduction and application of good agricultural practices (GAP) and the identification of the release of national superior cocoa clones named Masamba Cocoa Clone 01 (MCC 01) and Masamba Cocoa Clone 02 (MCC

02) through the cooperation of the Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute at the end of 2014. However, these efforts have not been able to provide maximum results, particularly in improving the production target of 3-4 tons/hectare/year.

Regarding these issues, the Office of Forestry and Plantation of North Luwu District, South Sulawesi Province, through DIPA APBD II Financial Year of 2015, introducing and implementing a coaching model to a target of increasing the production of at least 2 tons/hectare/year called as Kampung Kakao, or Cocoa Village. The goal to be achieved in the implementation of this policy is to testify and implement the mentoring model of which is believed to boost production from an average of 0.9 tons/hectare/year to 2 tons/hect-

are/year. And this is the first step in realizing a Cocoa Tourism Village area. The Cocoa Tourism Village begins from Batu Alang Village, with the location of 50 hectares and 2 farmer groups, and respectively 25 hectares and 1 farmer group in Kalotok Village and Bone Baru Village in Sabbang Sub-district. This program was started in March 2015 until December 2015.

During the implementation of this Cocoa Village Program, there are three main activities carried out, namely Increased Production Assistance, Cocoa-Based Community Development, and Support Systems.

Increased Production Assistance

The focus of this mentoring model approach is to provide individual guidance to the farmers or farms which are grouped into one farmer group and one overlay land with a ratio of one facilitator is responsible for 12 to 13 farmers with a frequency of at least one visit to each field with the field owner. The role of the facilitator is to provide technical recommendations to farmers regarding matters that need to be implemented based on the analysis of the condition of the field. The recommendations listed in the field control logbook held by the farmer or the owner of the field as a tools of further and follow-up monitoring.

Ir. Imran, Head of the Unit of Forestry and Plantation, North Luwu district said that the facilitation must be two people for one farmer group consisting of 25 people with a stretch of 25 hectares of land. In performing its duties, the facilitator will also be supported by the military through an officer of Pembina Village NCO (non-commissioned officer), or Babinsa, for each 50 hectares. The involvement of Babinsa in this program is to strengthen the technical instructions and recommendations given by a facilitator.

In maintaining the sustainability of the assistance and facilitation process, the agreement is built to provide co-operating expenses amounted to 1.5% of the additional increase in production yields obtained by farmers after reaching a minimum target of 2 tons/hectare/year.

Cocoa-Based Community Empowerment

As a continuation of this Cocoa Village development in a subsequent phase, it will be developed into an integrated cocoa tourism area. Through a mentoring program for the community, including women peasants, aside to direct in strengthening the farming industries, it is also the location of an integrated tourism area. To achieve it all, the efforts in empowering the communities to enable them to manage all sectors is important as well to prepare the houses



Foto: Armin Hari

of citizens who can run a place to stay for guests (home stay).

In order to realize an integrated tourism area, of course, the cooperations and coordination with various parties must be built, including with the banks to establish the online-based Financial Services Unit including financial support scheme for the farmers. No less important is the role of government and other stakeholders in initiating the establishment of cocoa-based stalls or café in the village centers. Another opportunity are being pursued in strengthening the empowerment of citizens are started after the cooperation with several agencies who have worked for the cocoa sector in North Luwu as Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) of Swisscontact, PT. Olam Indonesia, PT. Mars Symbioscience, Luwu Raya Cocoa Forum, Multi Jasa Tani Cooperative, and educational institutions such as the University of Hasanuddin. These institutions are expected to give positive contributions in the form of demonstration plot activities or direct guidance to farmers' groups that would lead to the creation of targeted villages as the village where the communities are able to make cocoa as their main source of income.

Laskar Belati: Defender of Cocoa from Kalotok Village

Warriors Dagger, or Laskar Belati, is a group of farmers whose members are farmers armed with a dagger (small sharp knife) used to coppicing or grafting on cocoa plantations in their village area. The recruitment process and the members of Laskar Belati is simple, and the decision-making system is also very simple. As well as being delivered by Ismail, one of the farmers in this group, "Laskar Belati emerges from our custom, the men who are gathered in the evening after a hard day on the farm. At the time of informal meeting, we usually talk about faced issues of cocoa, and exchange experiences how to solve it. There is nothing else that we are talking about other than cocoa." Uniquely, this Laskar Belati do not have a structure like other organizations.

According to Drs. Djamal Triatmojo who also the head of the village in the Kalotok Village, basically the formation of this group was based on a sense of mutual cooperation of citizens and a desire to share knowledge and experience. It is not surprisingly then if Laskar Belati daily average of the works being done are the work of mutual aid to assist other members in caring and developing the cultivation of cocoa plantations in their village. Technical knowledge of the cocoa plant originally



Foto: Armin Hari

they get from one technical facilitator from neighboring villages around 2009. From this acquaintance, the community of Kalotok develop their own knowledge they have until nowadays all members of the group can do the coppicing, grafting, and proficient in applying methods lawn care, as suggested in GAP.

On night-time meetings, usually they also come together to build an entries garden or nursery by mutual cooperation. The result now is some of the neighboring villages, even from outside the district, has made this Kalotok village as the location of the source of seed and scion of cocoa plants, known as the best quality.

As one of the target groups in Cocoa Village Program, Kalotok Village has a central role, given the location of the road axis and as a gateway to get to two other villages as well as the location of the targets in the program. Therefore, according to some members of Laskar Belati, in order to implement and to achieve success in Cocoa Village Program, there are several things that must be done. First and foremost is that the services provided by the Office of Forestry

and Plantation North Luwu District should be continuously improved and can be accessed by farmers. These services can be embodied into form of technical assistance to farmers, provision of farm inputs, and establishing field school. Then the thing that needs to be done is the construction of demonstration plots for each group, at least in one farmers group, there should be two or three plots to apply technical knowledge that has been gained from the experience and assistance of facilitators. However, the farmers so far just apply the knowledge directly in the field to practice with the success rate is still low.



COCOA MODEL NAGARI: COCOA PILOT AREA AT EACH DISTRICT/MUNICIPALITY

IN 2005, long before the Cocoa Development Program was started in West Sumatra Province, the total area of the cocoa plant as a whole was 25.042 hectares, and with the launching of the program the width is gradually increased to 200.000 hectares in 2015. These efforts were performed by local and national government which had provided assistance in forms of various activities for the expansion and rejuvenation, as well as the rehabilitation of the cocoa plant.

Along with the expansion of cocoa crop area, the amount of cocoa production is also increased significantly. According to data from Plantation Office of West Sumatra Province, if

in 2005 the cocoa bean production is amounted to 14.068 tons, the amount will be increased to 80.001 tons in 2013 after seven years implementation of Cocoa Development Program. The expansion of area and improvement of cocoa bean production certainly have a positive impact for farmers that indirectly improve farmers' income, reduce poverty, create job opportunities, and improve the welfare of farmers.

The current average number of cocoa production in West Sumatra Province is less than 1 ton/hectare, and certainly it can not be said as successful target in achieving the production expectations of 2,5 tons/hectare/year if the farmers have been able to apply the technology in an optimal farming and sustainability. It is influence by various factors, and the most important one is the lack of maintenance activities by farmers, as they don't do

fertilizing, pruning, sanitation, and exacerbated by high affected pests and diseases. In addition to the issue of productivity, quality assurance is also not in accordance with market demand because most farmers do not apply post-harvest management process, such as drying and storage, including the governance of fermented cocoa beans.

From these issues, the Government of West Sumatra Province through the Department of Plantation applies rehabilitation steps in order to improve the productivity and quality of cocoa beans in rapid and sustainable ways by establishing regional agribusiness cocoa pilot area as entitled "Development and Establishment of Cocoa Model Nagari," or better known as Cocoa Model Nagari term.

In the Dictionary of Indonesian explains that *nagari* is an area or groups of villages led by chief (*penghulu*),

or can be called as a district. In a system of nowadays government, *nagari* are territorial division of government or administrative region after sub-districts, and replaces the term of village, which is only applicable in the Province of West Sumatra. This *kenagarian* system had been known before the independence of Indonesia. The system is divided into two major streams in the system of *nagari* government in Minangkabau, i.e. Koto Piliang and Bodi Caniago which both have similarities with district governments on ancient Greece. *Nagari* is the most perfect settlement units and recognized by custom. *Nagari* has its limitation and territorial and it has its own political structures and law enforcement agencies. In addition, some units that must be met by a settlement to become a *nagari* of which the customs hall, mosque, and supported by paddy fields. Stipulation of Government Regulation No. 72 of 2005 on the village system, gives the meaning of that *desa* (village) can be tailored to the origin and socio-cultural conditions of local communities. The government still respects the value system prevailing in the local community but should still heed the shared value system in the life of the nation within the Republic of Indonesia.

Cocoa Model Nagari is applied in several villages in the districts and towns in the administrative area of West Sumatra Province which are implemented in some form of activity that is conducted continuously for several years. The activity begins with the designing the program by conducting studies on each of villages in collaboration with universities and research centers. Cocoa Model Nagari is also built through guidance, facilitation, and advocacy of multi-party relying on the potential of village itself, especially its human resources, natural resources, and existing institutional agribusiness. Implementation of this program, cocoa commodity could be functioned as the motor of the economy of villages. Until the 2014's, there have been 12 Cocoa Model Nagaris that has been established and still continue its operations, namely:

- Nagari Balimbings, Rambatan Sub-district, Tanah Datar District,
- Nagari Kuranji Hulu, Sei Geringging Sub-district, Padang Pariaman District,
- Aur Kuning, Payakumbuh Selatan Sub-district, Payakumbuh City,
- Nagari Guguk VIII Koto, Guguk Sub-district, Limapuluh Kota District,
- Nagari Sundata, Lubuk Sikaping Sub-district, Pasaman District,
- Nagari Supayang, Payung Sekaki Sub-district, Solok District,
- Nagari Kamang Hilir, Kamang Magek Sub-district, Agam District,
- Nagari Koto Baru, Luhak Nan Duo Sub-district, Pasaman Barat District,
- Nagari Pasir Palangai, Ranah Pesisir Sub-district, Sawahlunto City,
- Nagari Kubang, Lembah Segar Sub-district, Sawahlunto City,

- Tungkal Utara Village, Pariaman Utara Sub-district, Pariaman City, and
- Bungus Timur Village, Bungus Teluk Kabung Sub-district, Padang City.

The objectives to be achieved in the implementation of the Cocoa Model Nagari West Sumatra are, firstly is to build cocoa plants which are managed in accordance with the cultivation of healthy plants; secondly is to encourage the development of the village-based cocoa plant by the existing of technical management; thirdly is to find out the potential development and construction of other activities with the cocoa developmental efforts from aspects of integration with other businesses, as well as marketing and processing results; fourthly is to provide guidance to farmers' groups or cocoa farmers to make the cultivation of cocoa technical fit through the Field School for Integrated Pest and Disease Management (SLPHT) and socialization; and lastly is to build institutional farmers. In principle, each Cocoa Model Nagari must have one field for a demonstration plot, one plot of land for entries plantations, and one SLPHT.

It Starts from the Coordination Meeting and Field School

In the implementation of this Cocoa Model Nagari pilot program in West Sumatra, all activities are starting with coordination meetings in order to capture the problems and potentials, as well as efforts to find a good solution in the development of the Cocoa Model Nagari. From the results of the meeting, the proposed activities will be implemented in Cocoa Model Nagari in 12 districts/cities are created. In supporting the success of this Cocoa Model Nagari, it is required the cooperation and support of cross-cutting and cross-sectoral provincial government and district/city.

After the coordination meetings held, some unit activities are decided to be carried out in each location Cocoa Model Nagari. The first activity unit is training coppicing and grafting of cocoa plants with the requirement that number of farmers who will be trained from each location is 25 participants and they have never participated the same training or attend field school. This activity then grows as embryo of Cocoa Field School for Integrated Pest and Disease Management Field School (SLPHT).

At first, Cocoa SLPHT is only done in four locations: Nagari Supayang, Payung Sekaki Sub-district, Solok District; Nagari Balimbings, Rambatan Sub-district, Tanah Datar District; Tungkal Utara Village, Pariaman Utara Sub-district, Pariaman City; and Bungus Timur Village, Bungus Teluk Kabung Sub-district, Padang City. On each of the Field School, there are seven times meetings with class and practices in the field methods, with respective ratio of 30% and 70%. At the sixth meeting, the participants make a field visit to a group of farmers who have developed, Inovasi Farmers Group, Jorong, Nagari Balubuih, Guguk Sub-district, Limapuluh Kota District.

During the Cocoa SLPHT, there are some important materials such as the curriculum, such as policy development of plantations, plotting area, agro-ecosystems, analysis of agro-ecosystems (AAES), sanitation and weeding, pruning and fertilizing, cocoa pest and control, biological agents, natural pesticides making, coppicing and grafting techniques, harvest and post-harvest technology, and business management and group dynamics. Another thing that is also considered important to convey in this field school is how to utilize cocoa shell waste to be used as animal feed or organic fertilizer.

Cocoa Field School system is quite interesting, especially in the recruitment mechanisms and the development of farmers' knowledge as participants. On each Cocoa SLPHT, the number of participants is 25 people with a composition of 23 men came from the farmer or farmer group committees and 2 farming officer or extension officers who are living in each of these villages. And after attending the field school, the farmers will be returned to their groups and began to teach anything that they have acquired over the years. And no wonder then that almost of all members of farmers' groups in each village are proficient in applying good agricultural practice (GAP), and other nagari that are not included in the coaching program of Cocoa Model Nagari in West Sumatra also usually contact members of the farmer groups to teach and provide knowledge related to the governance of cocoa plants and the problems faced, and the solutions that must be done.

After the Field School for Integrated Pest and Disease Management have been completed, other program supports will follow in strengthening the farmers' groups in each village. The supports are in form of provision of agricultural tools as a means of practice for Cocoa SLPHT, procurement posters and infographics on cocoa as a means of education, and provision of meeting aula for farmer group at three Cocoa Model Nagari. Another additional activity is to conduct studies and reviews on Cocoa Model Nagari designs which



Foto: Armin Hari

are held to identify the potential and problems in each village and find solutions together which are built through coordination meetings.

Multi-stakeholders Participation

Cocoa Nagari model can not be implemented unilaterally, but it must be executed with multi-stakeholder participation, according to Mrs. Ir. Yusniar, MP. as Head of Infrastructure Plantation Office of West Sumatra Province. The participation of multi-stakeholders can be seen from the active participation of Cocoa Forum West Sumatra that builds the network through its members, such engagement with Andalas University in Padang to carry out the study of Cocoa Model Nagari designs in several villages in West Sumatra. From the results of the study, now it has created a pattern of cooperation by doing thematic field internship program which each period is followed by approximately 200 people and distributed to 8 locations of Cocoa Model Nagari. The activities of students as participants of the internship also include the portion of 70% to 80% about the guidance and assistance of the cocoa plant, especially from the aspect of cultivation and post-harvest. The internship participants are not necessarily a student with plantation or agriculture backgrounds, but it can

be attended by other students with different backgrounds. The first and most important issues are the activities in increasing the knowledge and skills in term of cocoa cultivation and post-harvest activities, especially for GAP. Besides equipped with technical skills, the participants are also supported with agricultural and technical plantation tools. In addition, through this thematic internship, support in form of cacao seeds are also distributed by the number of 14.000 rods to the students in order to be deployed in any locations of the internship in Cocoa Model Nagari.

Another thing that is done for the continuation of support for Cocoa Model Nagari is to build a network with some other governance institutions to be integrated together. For example, the Department of Animal Husbandry that can provide livestock support which can be combined with cocoa sector.

Reviving Plant Protection Brigade

In line with the objectives of this Cocoa Model Nagari program, Local Technical Implementation Unit (UPTD) of Plantation Office of West Sumatra Province revives the task force that formerly existed that they see themselves refer as cocoa crop protection brigade (BPT).



This brigade assigned to assist the farmers groups to address technical issues of cocoa plants, as well as ongoing assistance efforts to boost production enhancement and improvement of the quality of cocoa bean in West Sumatra. Technical implementation of this brigade is on standby to assist in solving technical problems in the cocoa plants that can not be handled by the farmers themselves. During the process, the brigade staff immediately comes to the farmers' field to see the problems faced by them and find a solution by utilizing the knowledge and skills they have.

According to Ir. Yusniar, MP., if there are any obstacles encountered, the farmers can directly contact UPTD BPT of Plantation Office of West Sumatra Province who is in charge of this brigade. Farmer or farmer group chairman, will personally contact the brigade staff by telephone. The response is also very quick, the report of the farmers will be responded in less than one week.

Assistance through the Survey, Facilitation, Field Visits, Monitoring and Evaluation Activities

The activities which are performed by the Plantation Office of West Sumatra are monitoring and evaluation in each Cocoa Model Nagari (NMK). This activity is to see how the implementation of the program and also the problems faced by farmers for further development. From the results of the 2014 monitoring and evaluation can be described the changes in average production of farmers in 10 nagari as follows:

No.	Name of Nagari	Cocoa Bean Production	
		Before NMK	After NMK
1	Nagari Sundata	800 kg/ha (2011)	> 2 ton/ha (2014)
2	Nagari Kurangi Hulu	800 kg/ha (2011)	> 1,2 ton/ha (2014)
3	Nagari Balimb-ing	< 600 kg/ha (2010)	1,5 ton/ha (2014)
4	Nagari Supayang	< 500 kg/ha (2012)	1,5 ton/ha (2014)
5	Nagari Guguk VIII Koto	700 kg/ha (2011)	2 ton/ha (2014)
6	Nagari Aur Kun-ing	700 kg/ha (2011)	2 ton/ha (2014)
7	Nagari Kubang	200 kg/ha (2013)	500 kg/ha (2014)
8	Nagari Pasia Pelangai	300 kg/ha (2013)	500 kg/ha (2014)
9	Nagari Kamang Hilir	425 kg/ha (2012)	1 ton/ha (2014)
10	Nagari Koto Baru	596 kg/ha (2012)	1 ton/ha (2014)

As for Cocoa Model Nagari in Padang City and Pariaman City, the increase in production has not seemed significant, because the Cocoa SLPHT was newly conducted in 2014. However, from the aspect of cultivation, it has shown widely demonstrated changes. Before the program intervention, nearly 80% of cocoa plants in the field with the condition has not been mowed and looks like a forest of cocoa. And now it has started to show changes with the implementation of good cocoa crop care governance, or good agricultural practices (GAP).

Lessons learned during the process of assistance during this time are:

- The level of education of farmers greatly affects the absorption rate of each presented technology, so it also affects the implementation process in the field. This lesson learnt is based on monitor experiences for the Cocoa SLPHT participants in Tanah Datar District in 2014 with the condition of 30% illiterate and only 5% are high school level graduations.
- The assistance and facilitation factors by officers at the site regularly and continuously to farmers determine the level of success. Based on the monitoring results of the assistance that is rarely done, it gives the effect of a lack of motivation of farmers.



KAMPUNG COKELAT: A NEW OASIS IN KOLAKA

IT was around 2014. Few months after Ir. H. Muhammad Bachrun Hanise, MT. was inaugurated as the Head of Plantation and Livestock Service Office of Kolaka District, he visited some areas. One of his destination was Unduha Village in the hilly area as one of cacao production centers in areas of Kolaka. During those times, the interest of farmers in cultivating cacao was decreasing due to the aged and less productive plants. Most of the farmers were changing the crops to others for income source reasons. The cacao plantations were slowly being neglected.

During his visit, the new elected head of the office were expressing the local government support to throw back the spirits of farmers in cultivating this export quality crop. In front of the farmers, he mentioned that the local government would establish an alternative tourism spot to be visited by local and foreign tourists who wanted to learn and see directly about cacao plantation and its processes into chocolate products. *"Most of the chocolate products enthusiasts in European and American countries have no experience in witnessing the crop directly. They also don't know about*

the crop, and how it is processed into bars." H. Muhammad Bachrun Hanise explained to the farmers. Furthermore, the cacao farmers who had cultivated the crops for years also didn't have any knowledge on how a chocolate product was produced from beans. They even had never tasted a chocolate.

"It is important to show the farmers how their cacao beans are processed into chocolate products. It is the effort in order to provide them a spirit to grow the crops. This effort will give them confidence that what they produce from planting to harvesting periods are highly important and needed by most of the people in the planet." H. Muhammad Bachrun Hanise added. Thus, this Kampung Cokelat (chocolate village) would be a meeting place for the farmers and the chocolate enthusiasts around the world to exchange the experience and knowledge.

Later on, the Head of Plantation Service Office of Kolaka District was invited by the cacao farmers to do side-grafting in the plantation areas of Lalombaa. With H. Alimuddin and other cacao farmers, he demonstrated how to do grafting for some trees in the field at that area. *"When I visited this area, the idea come into my mind. It would be nice to have such a location for learning sharing, education, and*

recreation venue. During those time, the Regent of Kolaka District had challenged each government unit to have one innovative program. Then the idea of establishing a chocolate village then occurred." As explained by the Head of Plantation and Livestock Service Office of Kolaka District.

The idea of chocolate village is to create a showroom for people who haven't seen any plantations of cacao. How the farmers cultivate the land, treat the plants, harvest the beans, and how to process the cacao bean into chocolate products. Because the people who consume chocolate products don't have experience to plantations. It is also for the farmers who don't know about how chocolate products are processed from their harvested cacao beans. Thus, this place will become a meeting point for chocolate enthusiasts and cacao farmers.

Cacao Farmers and Chocolate Village

Through learning processes from other cacao or chocolate villages in some places of Indonesia, the Plantation and Livestock Service Office of Kolaka District asked some architects to create plan of construction. The processes itself had taken such a long period to finish the construction. And now, the local government of Kolaka District had purchased three hectares land for the development of this chocolate village. Furthermore, there are about 500 hectares land of local farmers around this facility.

"It will be quite ridiculous if this place is called as chocolate village, but there is no cacao farmers who stay within the area." H. Muhammad Bachrun Hanise expresses his thoughts. It is the reason why the local government only possess three hectares of land for the development, and while motivating other cacao farmers to cultivate the

plantations in their lands. Therefore, this facility is utilized by them, especially the farmers group, to have their activities. In every ten days, there are two farmers groups who have revolving fund withdrawal. They also have their schedule for communal working activities in each of month. In a regular period, the farmers will work together to clean or to do some treats to the members' plantation areas.

The idea for showroom and learning point, it is expected that this chocolate village also will demonstrate how to integrate the livestock, especially goat, with cacao plantation. The leaves and cacao pods are nutrient boosts for the animals, and the farmers also can produce bio-gas stations for energy and resources for fertilizers.



Foto: Armin Hari



Future Development

This chocolate village of Kolaka District is still in progress for its development. And as showroom, this facility also produces chocolate products by processing their harvested beans within the area. But the scale is still in low due to lack of processing machines. The products are aimed as gifts for the visitors and special guests who come to this place, still not in huge production scale for public.

In the future, Kampung Cokelat of Kolaka District will become an integrated destination area. Around the river bank, as the main gate, will be developed into culinary spots. The facility also will constructs some outbound challenges that can attract for the government and private institutions for having outdoor activities such as retreat, family gathering, and outbound. And an accommodation facilities for the guests who want to spend couple of

days in chocolate village.

“As learning point for farmers and chocolate enthusiasts, Kampung Cokelat also will be equipped with meeting halls. And the local government is supporting this idea of development. But with lack of government budgets, we will construct this area slowly. The facility will be constructed one by one. But this is the local government’s priority.” As stated by H. Muhammad Bachrun Hanise while walking together through the cacao plantations of Kampung Cokelat.

It will be a new destination spot in Kolaka District. An idea of integrated area as learning point and experience sharing among farmers, and between cacao farmers with the chocolate enthusiasts. And as a living laboratory for farmers in developing their cacao plantations in the future.



TRAINING IN DESIGNING AND WRITING THE PUBLICATION MEDIA



COCOA Sustainability Partnership (CSP) is conducting training in designing and writing as form of providing skill to manage and develop publication media which are produced by Regional Cocoa Forum (RCF). This activity is performed in two days in Jakarta, and participated by two representatives of forum, from Forum Kakao Kolaka (FOKKA), Forum Kakao Aceh (FKA), Forum Kakao Sumatera Barat, Forum Komunikasi Kakao Sulawesi Tengah, and Forum Masyarakat Kakao Luwu Raya.

Each day, the participants are attending the activity since morning to afternoon. Toha Arifin from Cocoa Sustainability Partnership opens this activity and explains about the objec-

tives and outputs. Furthermore, the expectations from the participants are also mapped. And generally, they show that this training can provide insights and knowledge to the committee members and secretariat staff of forum in writing, mastering the writing techniques, writing structures, probing the writing materials, and how to compose title that can attracts interests of the readers.

Regarding that RCF is an institution in the local and regional scope, and gathers information, such as how to plant cacao, how to grow, how to fertilize, and how to sell the dry cacao bean. And those information should be developed into writing and news. Then,

it is significant for the forum staffs to gain ability and skill in how to compose good writing, such as article, feature, essay, news, and other forms of publication. (Forum Kakao Kolaka/Amiruddin Amier)



DRAFTING THE CURRICULUM AND TRAINING MODULE FOR SUSTAINABLE COCOA CULTIVATION AND POST HARVEST

AFTER the first meeting of the National Cocoa Curriculum with the writers team in Ministry of Agriculture building on last June 26, 2017, the team members are gathering again for the writing process in ICCRI, Jember, East Java. The team itself consists of Widyaistrwa staffs and supported by other cocoa experts.

On the first day, the team is conducting meeting with Dr. Agung Wahyu Susilo, SP., MP., and staffs of Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute (ICCRI) in order to agree about the schedules and agenda in writing the curriculum and training modules for sustainable cocoa good agriculture practices and post harvest within the upcoming three days (August 23 - 25, 2017). ICCRI also provides supports in term of facilitation and consultancy of experts for each group, i.e. cultivation processes, pest and disease, and post

harvest. In this occasion, the institution also supports processes with the references in enriching the insights and understanding of cocoa cultivation and post harvest activities for the writers.

As the process of national curriculum and training modules compiling, the team is also visiting the field in order to gain knowledge on cocoa-related activities, such as cultivation and cocoa processing as post harvest. After those activities, all groups are drafting the curriculum and modules with the cocoa experts of ICCRI for several days.

The national cocoa curriculum and training modules is generated this year by Cocoa Sustainability Partnership with active participation from its members. These materials will be utilized by technical implementer units of agricultural training in providing training and technical assistance for field extension staffs.

DRAFTING THE NATIONAL WORKING COMPETENCY STANDARD (SKKNI) FOR SUSTAINABLE CACAO CULTIVATION



Foto: Armin Hari

As part of the planning of Cocoa Sustainability Partnership with its members and other stakeholders for cacao sector, the Curriculum and Training Modules for Sustainable Cacao Cultivation and Post Harvest will be issued in 2017. And in order to finalize those curriculum and training modules, the first and important phase to be prepared is the drafts of National Working Competency Standard of Indonesia (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/SKKNI) for Sustainable Cacao Cultivation.

During this three days workshop, the members of drafting team for SKKNI are gathering in Bogor, West Java, in finalizing the first draft of certain standard competencies. Furthermore, staffs of the Center for Agricultural Training (Puslatan), The Center for Counseling and Human Resource Development of Agriculture (BPPSDMP), Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia, are highly contributing during the sessions of this drafting processes.

In his speech, The Head of Puslatan, Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc., stresses out that this activity is the description form in action of our hardworking as the efforts to improve and develop the agricultural sector in Indonesia, particularly cacao plantation. Moreover, he mentions that the expected output as the implementation of these curriculum and training modules, and working competency standards of sustainable cacao cultivation is that Indonesia in the future is not only producing raw materials, but also to develop the processing technology to produce high-quality products.

“The objective of these competency standards is how to prepare the competency of Indonesian human resources, especially the youths, in cacao sector that they can gain abilities and skills in order to compete in the free market.”

As Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc., delivers during his directional speech for the opening ceremony of the workshop for Drafting the National Working Competency Standard of Indonesia for Sustainable Cacao Cultivation.

In the similar occasion, Imam Suharto as Chairman of Supervisory Board of Cocoa Sustainability Partnership expresses that this drafting the national curriculum and training modules, and working competency standards is part of synergy initiatives among CSP and Minister of Agriculture, Republic of Indonesia. *“CSP expects that all parties who are actively engaged into this drafting processes can provide their supports, especially during its implementation processes.”*

The working competency standard itself has approximately thirty three standards which cover the activities since the preparation of land until post harvest.

As the previous objectives, in the last day of this workshop, the first draft of National Working Competency Standards for Sustainable Cacao Cultivation can be achieved. And the draft will be discussed further in the upcoming activities. (CSP)



Recommendation of External Audit COCOA SUSTAINABILITY PARTNERSHIP IS TRUSTED ORGANIZATION

IN the end of August 2017, as an institution with legal standing, Cocoa Sustainability Partnership conducted its external audit for some activities. Particularly the procedures of administration and financial. This external audit itself was the second time which was performed by PwC Indonesia.

Within couple of days, the auditors did precisely checks on records of administration and financial states which were implemented by the Executive Office of CSP. And from the results, PwC Indonesia approved with a very good score for CSP. But as external audit activity, it still has some issues and findings need to be fixed in the future. Those issues and findings are as follows:

- **No segregation of duties for journal posted**
Based on our samples of cash disbursement validation, it was noted that there were several samples where the journal is posted without being reviewed or approved by another person. It was caused because all posted jour-

nals after June 14, 2017, were only through one person. And before this date, there was still one more person reviewed and approved those journals, i.e. the Executive Director. But after the resignation of Executive Director, all journals occurred after the date up to now are all posted and reviewed by one person.

PwC Indonesia recommended that the management urgently find the Executive Director position to review and approve the journals created by Office Manager. It is important to perform in order to decrease the risks of frauds and other financial errors.

- **Supporting documents for procurements have not been fully completed.**
In the procurement of goods and services process based on SOP, there are several documents needed. Such as purchase request, bidding analysis, purchase order, good receipts note (for goods), invoices, payment request



form, expenses plan, and cash disbursement voucher for journal posting. Based on samples, there are some procurement processes which have not been completed with the documents.

The provided recommendation is that all processes of procurements must be completed with supporting documents in order to eliminate the risk that the requests of goods and services procurements are not for office operational activities needs

- **No bidding process for consultant.** Based on SOP, all goods and services must be bid through bid analysis form. However, there were 2 vouchers that did not perform bid analysis. Based on email confirmation from Management and

Supervisory Board, no bidding process in that time because it needs immediate responses with limited time allocation.

Generally, the external audit process does not find any crucial issues and findings on domain of financial transaction and administrative process which are performed by CSP. As the first audit by the same audit organization. There are some inputs and recommendation that must be implemented in the future. And it shows that Cocoa Sustainability Partnership as legal organization is publicly trusted for its financial transaction and administration system. (CSP-AH)



**SOCIAL MEDIA
ADDRESS**